



2
0
2
4

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
KELAS IB

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin serta ridhonya, Pengadilan Negeri Situbondo dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun



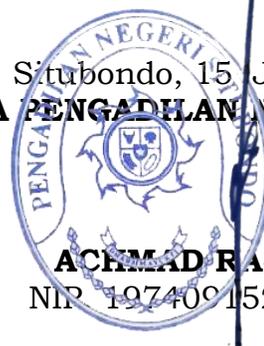
2024, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisien, dan efektif.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 memuat keadaan perkara, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik dan pengawasan pada Pengadilan Negeri Situbondo, disusun sebagaimana surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 4506 / SEK / OT.1.6 / XII / 2024, tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 9328/KPT.W14-U/OT1.6/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada Tim Penyusun dan Semua Warga Pengadilan Negeri Situbondo yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini, serta apresiasi yang setinggi tingginya atas kinerja dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas demi terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo Yang Agung.

Dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perencanaannya guna penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun yang akan datang.

Situbondo, 15 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO



ACHMAD RASJID, S.H.
NIP. 197409152000031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan.....	1
B. Visi dan Misi	2
C. Struktur Organisasi.....	3
BAB II KEADAAN PERKARA DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	11
A. Keadaan Perkara	11
B. Penyelesaian Perkara	12
C. Program Prioritas Nasional	15
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	18
A. Mutasi.....	25
B. Promosi	26
C. Pensiun.....	27
D. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)	27
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA, PRASARANA DAN	
 TEKNOLOGI INFORMASI.....	30
A. Pengelolaan Keuangan.....	30
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	32
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	40
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	63
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	63
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	71

BAB VI	PENGAWASAN	82
	A. Pengawasan Internal.....	82
	B. Evaluasi	86
BAB VII	PENUTUP	88
	A. Kesimpulan	88
	B. Rekomendasi	89

DAFTAR TABEL

NO	TABEL	URAIAN	Hal
1	Tabel 1	Keadaan Perkara di tingkat Peradilan Umum Tingkat Pertama (per 31 Desember 2024)	11
2	Tabel 2	Grafik Keadaan Perkara di tingkat Peradilan Umum Pengadilan Negeri Situbondo (data SIPP per 31 Desember 2024)	12
3	Tabel 3	Sisa Perkara Tahun 2023 Putus Tahun 2024	12
4	Tabel 4	Jumlah yang Diputus Tepat Waktu	13
5	Tabel 5	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	13
6	Tabel 6	Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi Tahun 2024	14
7	Tabel 7	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diversi Tahun 2024	14
8	Tabel 8	Capaian Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2024	16
9	Tabel 9	Laporan Layanan Posbakum	16
10	Tabel 10	Jumlah SDM Pengadilan Negeri Situbondo	18
11	Tabel 11	SDM Bidang Teknis Berdasarkan Pendidikan	19
12	Tabel 12	SDM Bidang Non Teknis berdasarkan Pendidikan	20
13	Tabel 13	Jumlah Pesonil Pengadilan Negeri Situbondo	20
14	Tabel 14	Jumlah Jabatan Kosong	20
15	Tabel 15	Perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan Serta Beban Kerja/Perkara Yang Harus Ditangani Tahun 2024	21
16	Tabel 16	Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata Dalam Sebulan Per Tiap Majelis Hakim Pada Tahun 2024	21
17	Tabel 17	Daftar ASN berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	22
18	Tabel 18	Rekap Jumlah ASN berdasarkan Pangkat/Golonga Ruang	23
19	Tabel 19	Daftar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	24
20	Tabel 20	Daftar Mutasi Masuk	25
21	Tabel 21	Daftar Mutasi keluar	26
22	Tabel 22	Daftar Promosi Jabatan	26
23	Tabel 23	Daftar Promosi Pangkat	26
24	Tabel 24	Daftar BUP	27
25	Tabel 25	Daftar Diklat Tahun 2024	28
26	Tabel 26	Realisasi Belanja DIPA 01	31
27	Tabel 27	Realisasi Belanja DIPA 03	31

28	Tabel 28	Daftar Tanah	32
29	Tabel 29	Daftar Gedung dan Bangunan	33
30	Tabel 30	Daftar Rumah Dinas	34
31	Tabel 31	Daftar Kendaraan Dinas	34
32	Tabel 32	Daftar Inventaris Kantor	35
33	Tabel 33	Daftar Peralatan dan Mesin	35
34	Tabel 34	Implementasi E-Court	43
35	Tabel 35	Perbandingan Perkara Perdata Pengguna E Court	48
36	Tabel 36	Implementasi Versi SIPP 31 Desember 2024	51
37	Tabel 37	Daftar Perangkat Jaringan Komputer	61

DAFTAR GAMBAR

NO	GAMBAR	URAIAN	Hal
1	Gambar 1	Struktur Organisasi	3
2	Gambar 2	Penandatanganan MOU Posbakum Tahun 2024	15
3	Gambar 3	Fasilitas E-Court Corner PTSP Pengadilan Negeri Situbondo	43
4	Gambar 4	Media Sosial Pengadilan Negeri Situbondo	45
5	Gambar 5	Leaflet E-Court bagi Pengguna Insidentil	45
6	Gambar 6	Vestouch Interactive Android Kiosk	46
7	Gambar 7	Tampilan Aplikasi E Court	47
8	Gambar 8	Rapat Koordinasi Kejari, Kepolisian dan Rutan	49
9	Gambar 9	Monev E Berpadu bersama Kejari, Kepolisian dan Rutan	50
10	Gambar 10	BM Lenovo Manufacture System x3250 M5 Rack Server	59
11	Gambar 11	Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 Server	60
12	Gambar 12	Perangkat Jaringan	61
13	Gambar 13	Uninterruptible Power Supply (UPS)	61
14			
15			
16	Gambar 14	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	64
17	Gambar 15	Assesment AMPUH oleh Pengadilan Tinggi Surabaya	65
18	Gambar 16	SK Nilai Sertifikasi AMPUH	66
19	Gambar 17	Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Situbondo	68
20	Gambar 18	Briefing Petugas PTSP di Pengadilan Negeri Situbondo	69
21	Gambar 19	Vestouch untuk informasi publik	69
22	Gambar 20	Tampilan untuk Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi	70
23	Gambar 21	Monitor Jadwal Sidang	70
24	Gambar 22	Tampilan Aplikasi Antrian sidang Secara eletronik	70
25	Gambar 23	Aplikasi E- Court	71
26	Gambar 24	Aplikasi E- Berpadu	72
27	Gambar 25	Aplikasi E- Eraterang	73
28	Gambar 26	Indeks Persepsi Korupsi	74
29	Gambar 27	Aplikasi Antrian PTSP	74
30	Gambar 28	Antrian Panggilan Sidang	75

31	Gambar 29	E-Brosur	76
32	Gambar 30	Arsip Digital	77
33	Gambar 31	Tampilan Portal PN Situbondo	78
34	Gambar 32	Tampilan Aplikasi Santri	78
35	Gambar 33	Tampilan Aplikasi Eska	79
36	Gambar 34	Tampilan Aplikasi SIPKAN	80
37	Gambar 35	Tampilan Aplikasi SILAPDIS	80
38	Gambar 36	Pengawasan dan Pembinaan	81

The background of the page is an abstract design consisting of multiple layers of wavy, flowing lines in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. The lines create a sense of movement and depth, resembling water or smoke. The overall effect is clean, modern, and professional.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Peradilan dibawahnya khususnya peradilan Umum saat ini berbasis teknologi dan dituntut memberikan pelayanan prima di bidang hukum. Maka Pengadilan Negeri Situbondo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, biaya ringan, transparan, dan professional.

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum, dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata mayarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadikan pelindung dan pengayom masyarat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Situbondo mengalami perubahan nomenklatur memiliki tupoksi yang telah diuraikan dalam peraturan tersebut. Penyelenggaraan administrasi di bidang yudisial maupun non yudisial di Pengadilan Negeri Situbondo selalu meningkat di setiap tahun, yang mana dapat dilihat dalam rincian tugas kepaniteraan dan kesekretariatan. Usaha terus-menerus dari seluruh aparat Pengadilan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan telah berhasil menjabarkan visi dan misinya yang lebih operasional sesuai dengan amanat Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010-2035.

Penjabaran tersebut tergambar dari kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan langsung oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Situbondo bersama dengan seluruh Stakeholders yang telah menghasilkan petunjuk-petunjuk teknis dan praktis guna memudahkan pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. VISI DAN MISI

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung yang merupakan lembaga yudikatif tertinggi dan Pengadilan Negeri Situbondo dalam struktur organisasi berada dibawah naungan Mahkamah Agung , maka memiliki visi dan misi yang mengacu pada Mahkamah Agung yaitu :

1. VISI

Visi adalah Suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Situbondo.

Visi Pengadilan Negeri Situbondo mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung ”

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Situbondo;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Situbondo;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Situbondo digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 : Struktur Organisasi



Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi serta Tata kerja dan Organisasi Peradilan telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas, tingkah laku dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita di daerah hukumnya, dan melaporkan Pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan dapat memberikan keterangan hukum kepada Instansi Pemerintah daerahnya, apabila diminta, atau sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan;
- b. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
- c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan;
- d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan;
- e. Sebagai pelaksana administrasi kesekretariatan, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Sekretaris Pengadilan;
- f. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;
- g. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya;
- h. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Negeri apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas atau yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya Atau sebagai berikut :

- 
- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
 - b. Mewakili ketua bila berhalangan;
 - c. delegasi wewenang dari ketua;

3. Hakim

Hakim bertugas dan berwenang memeriksa , memutuskan dan menyelesaikan perkara Pidana maupun Perkara Perdata di tingkat pertama serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman.

4. Panitera

Panitera Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, dalam melaksanakan tugas Panitera menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata.
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Khusus
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, menyajikan data perkara dan transparansi perkara.
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dari APBN dalam program teknis dan keuangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, monitoring, evaluasi, minutas, dan administrasi kepaniteraan
- g. Pelaksanaan Mediasi.
- h. Pembinaan teknis kepanitera dan kejurusitaan dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri Situbondo, dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan urusan keuangan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- f. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- g. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, dan
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo

6. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaan kelengkapan berkas pidana
- b. Pelaksanaan register perkara pidana
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.

- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik .
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimunutasi .
- h. Pelaksanaan pemberitahuan salinan putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir .
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan salinan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan Kembali;

7. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaan kelengkapan berkas perdata
- b. Pelaksanaan register perkara perdata
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimunutasi.
- e. Pelaksanaan pemberitahuan salinan putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan salinan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan Kembali.
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan salinan putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan risalah penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- i. Pelaksanaan penerimaan Konsinyasi
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi

- k. Pelaksanaan penyimpanan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

8. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan – bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana

Sub Bagian Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

10. Kepala Sub Bagian Perencanaan , Tehnologi Informasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

12. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

13. Jurusita/Jurusita Pengganti

Jurusita / Jurusita Pengganti mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;

- 
- d. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
dan
 - e. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada
para pihak terkait.

The background of the page is an abstract design consisting of multiple overlapping, wavy lines in various shades of blue, ranging from light sky blue to a deeper, more saturated blue. The lines flow from the top right towards the bottom left, creating a sense of movement and depth. The overall effect is clean, modern, and professional.

BAB II
KEADAAN PERKARA DAN
PROGRAM PRIORITAS
NASIONAL



BAB II

KEADAAN PERKARA DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

A. KEADAAN PERKARA

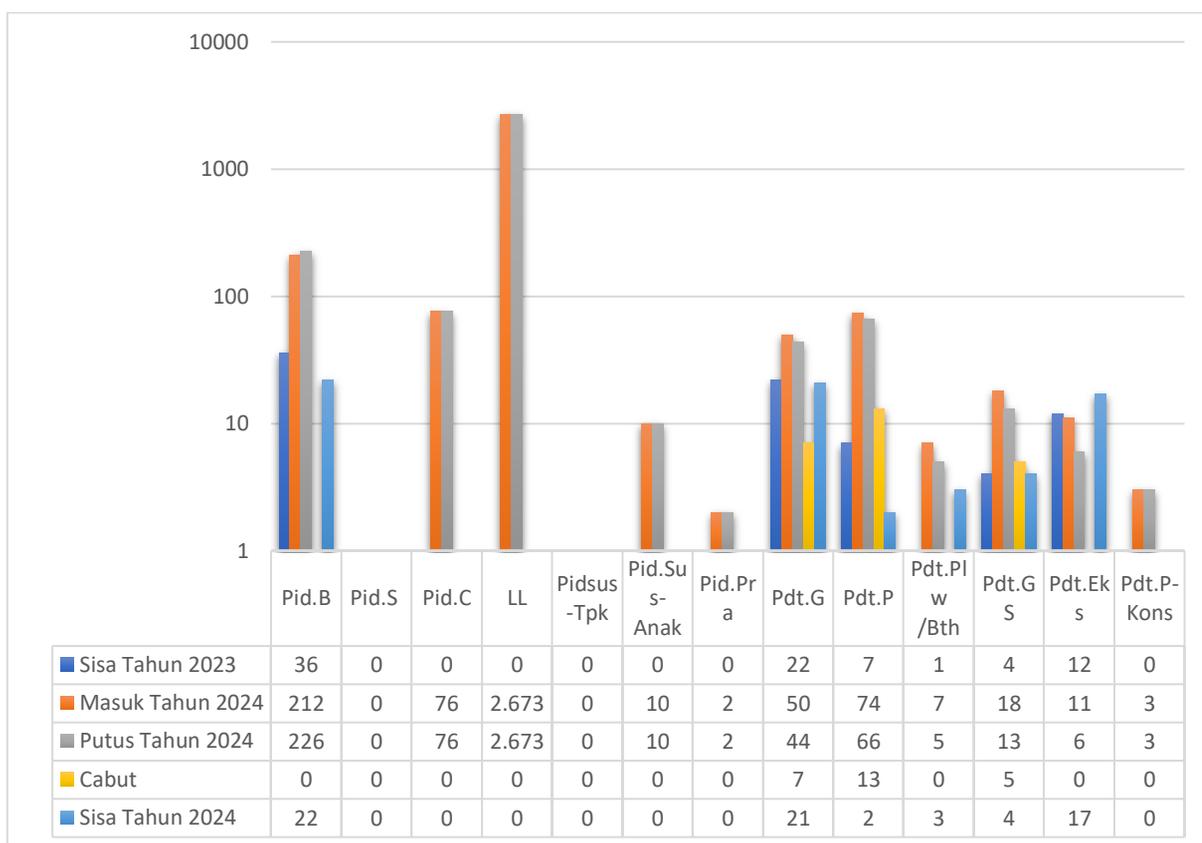
Kelas IB adalah Pengadilan Tingkat Pertama dengan kategori perkara ~500 perkara per tahun terdiri dari perkara pidana dan perdata. Data perkara tersebut dapat digambarkan secara umum pada tabel berikut (Data per 31 Desember 2024).

Tabel 1 : Keadaan Perkara di tingkat Peradilan Umum Tingkat Pertama

No	Nama Perkara	Sisa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Putus Tahun 2024	Cabut	Sisa	% Penyelesaian
1	Pidana Biasa	36	212	226	0	22	91%
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	-
3	Pidana Cepat/Ringan	0	76	76	0	0	100%
4	Pidana Lalu Lintas	0	2.673	2.673	0	0	100%
5	Pidana Khusus Tipikor	0	0	0	0	0	-
6	Pidana Khusus Anak	0	10	10	0	0	100%
7	Pidana Praperadilan	0	2	2	0	0	100%
8	Perdata Gugatan	22	50	44	7	21	71%
9	Perdata Permohonan	7	74	66	13	2	98%
10	Perdata Perlawanan (Bantahan)	1	7	5	0	3	63%
11	Perdata Gugatan Sederhana	4	18	13	5	4	82%
12	Perdata Eksekusi	12	11	6	0	17	26%
13	Perdata Permohonan Konsinyasi	0	3	3	0	0	100%



Tabel 2 : Grafik Keadaan Perkara di tingkat Peradilan Umum Pengadilan Negeri Situbondo



(Sumber : data SIPP per 31 Desember 2024)

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Tahun 2023 yang Diputus Tahun 2024

Jumlah sisa perkara Tahun 2023 yang diputus pada Tahun 2024 pada Kelas IB adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Sisa Perkara Tahun 2023 Putus Tahun 2024

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2023	SISA PERKARA TAHUN 2023 YANG DISELESAIKAN TAHUN 2024	SISA	KETERANGAN
1	Perdata	34	34	0	Perdata Gugatan, Perlawanan/ Bantahan, Gugatan Sederhana, dan Permohonan
2	Pidana	36	36	0	Pidana Biasa



2. Jumlah Perkara yang diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2024 pada adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Jumlah yang Diputus Tepat Waktu

NO	Jenis perkara	Sisa Perkara Tahun 2023	Perkara Masuk Tahun 2024	Jumlah perkara yang diputus tepat waktu Tahun 2024	Sisa Perkara Tahun 2024	Keterangan
1	Perdata	34	57	130	30	Perdata Gugatan, Perlawanan/ Bantahan,
2	Pidana	36	222	236	22	Pidana Biasa, perkara Anak
Jumlah		70	277	366	52	

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Tahun 2024 pada adalah sebagai berikut :

Tabel 5 : Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

No	Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Keterangan
			Banding	Kasasi	PK	
1	Perdata	157	135	139	156	Yang Mengajukan Banding : 22 Kasasi : 18 PK : 1
2	Pidana	226	200	196	226	Yang Mengajukan Banding : 26 Kasasi : 30 PK : 0
3	<i>Pidana</i>	<i>226</i>	-	<i>224</i>	-	<i>Sesuai dengan IKU Pidana Biasa dan Pidana Anak</i>

Catatan: Jumlah Perkara Putus tidak termasuk Pidana Lalu Lintas, Cepat/Ringan



4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi

Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada Tahun 2024 pada adalah sebagai berikut:

Tabel 6 : Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi Tahun 2024

Nama Perkara	Mediasi		Keterangan
	Berhasil	Gagal	
Perkara Perdata	1	43	<ul style="list-style-type: none"> - Berhasil dengan Akta perdamaian : 1 - Berhasil sebagian : 0 - Berhasil dengan Pencabutan : 0 - Gagal (Tidak Berhasil) : 42 - Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 1

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi

Jumlah perkara pidana anak yang berhasil melalui diversi pada Tahun 2024 pada adalah sebagai berikut :

Tabel 7 : Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diversi Tahun 2024

Nama Perkara	DIVERSI		Keterangan
	Berhasil	Gagal	
Pidana Anak	1	1	<ul style="list-style-type: none"> - Berhasil dengan Penetapan Diversi: 1 - Berhasil sebagian : 0 - Berhasil dengan Pencabutan : 0 - Gagal (Tidak Berhasil) : 1 - Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan): 0

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. Posbakum (Satker yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pada Tahun 2024 telah melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultansi Posbakum dengan Penyedia Jasa “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN).

Dan Ketua beserta POSBAKUMADIN telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum (POSBAKUM) di tanggal 2 Januari 2024.

Gambar 2. Penandatanganan MOU Posbakum Tahun 2024



Kegiatan Layanan Konsultansi Posbakum ini dibiayai oleh anggaran DIPA 03 Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 28.000.000, dan target volume output sebesar 280 OJ (orang /jam). Dari anggaran tersebut, sampai dengan akhir Tahun 2024 telah



terrealisasi sebesar Rp. 28.000.000 (100%) dengan capaian volume output dari 290 layanan, sebagaimana rincian sebagai berikut :

Tabel 8 : Capaian Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2024

Nama LBH/ Penyedia Layanan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)	28.000.000,00	28.000.000,00	100%

Tabel 9 : Laporan Layanan Posbakum

No.	Tahun	Bulan	Jumlah Layanan	Pemohon Layanan
1	2024	Januari	23 Layanan	11 Pemohon
2	2024	Februari	19 Layanan	9 Pemohon
3	2024	Maret	20 Layanan	10 Pemohon
4	2024	April	20 Layanan	10 Pemohon
5	2024	Mei	21 Layanan	11 Pemohon
6	2024	Juni	20 Layanan	11 Pemohon
7	2024	Juli	26 Layanan	13 Pemohon
8	2024	Agustus	26 Layanan	13 Pemohon
9	2024	September	28 Layanan	14 Pemohon
10	2024	Oktober	29 Layanan	15 Pemohon
11	2024	November	27 Layanan	13 Pemohon
12	2024	Desember	31 Layanan	15 Pemohon

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada masyarakat. Tujuan dilakukannya sidang keliling adalah untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.



Pada Tahun 2024 tidak ada pelaksanaan sidang keliling karena tidak terdapat anggaran yang tersedia untuk kegiatan Sidang Keliling.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Perkara Prodeo (Layanan Pembebasan Biaya Perkara) merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Pembebasan biaya perkara diperuntukkan untuk masyarakat miskin namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara.

Pada untuk Tahun 2024 tidak ada pelaksanaan prodeo, dikarenakan tidak memperoleh anggaran yang tersedia untuk kegiatan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).

The background of the slide is a light blue gradient with several layers of darker blue, wavy, ribbon-like shapes that flow across the frame from the top right towards the bottom left. The text is centered over these waves.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good government* dan *Good governance*.

Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (*excellence Service*).

Selain itu untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, diperlukan komposisi Sumber Daya Manusia yang baik, dari segi kualitas maupun kuantitas.

Komposisi SDM pada berdasarkan Jabatan, Kepangkatan, Golongan dan Pendidikan :

Tabel 10 : Jumlah SDM Pengadilan Negeri Situbondo

NO	Uraian Jabatan	Jumlah		Keterangan
		Terisi	Kosong	
1	Ketua	1	-	-
2	Wakil Ketua	1	-	-
3	Hakim	4	-	-
4	Panitera	1	-	-
5	Sekretaris	-	1	-



6	Panitera Muda	3	-	-
7	Kepala Sub. Bagian	3	-	-
8	Panitera Pengganti	2	-	-
9	Jurusita	1	-	-
10	Jurusita Pengganti	3	-	-
11	Analisis Perkara Peradilan/Cakim	9	-	-
12	Analisis Perkara Peradilan/CPNS	3	-	-
13	Pengelola Penanganan Perkara	1	-	-
14	Pengadministrasi Hukum	1	-	-
15	Bendahara (Kepaniteraan)	-	1	Dirangkap oleh JS
16	Bendahara	-	1	Dirangkap oleh pengelola BMN (Penyedia Data dan Informasi)
17	Pengolah Data PNPB Kementerian / Lembaga	-	1	Dirangkap oleh JSP
18	Pengelola Barang Milik Negara (Penyedia Data dan Informasi)	1	-	-
19	Pengadministrasi Persuratan	-	1	-
20	Pengelola Situs/Web	-	1	-
21	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	1	-
22	Pengelola Sistem dan Jaringan	-	1	-
23	Analisis Akuntabilitas Kinerja	-	1	-
24	Pengelola Kepegawaian	-	1	-
25	Analisis Organisasi dan Tata Laksana (Penata Layanan Operasional)	1	-	-
26	Arsiparis	-	1	-
27	Pustakawan	-	1	-
28	Pranata Komputer	-	1	-
29	Pranata Peradilan	-	1	-
	JUMLAH	34	13	

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Negeri Situbondo per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 : SDM Bidang Teknis berdasarkan Pendidikan

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Pendidikan					
		L	P		S-3	S-2	S-1	D3	SMA	SMP
1	Ketua	1	-	1	-	-	1	-	-	-
2	Wakil Ketua	1	-	1	-	1	-	-	-	-
3	Hakim	4	-	4	-	2	2	-	-	-
4	Panitera	1	-	1	-	-	1	-	-	-
5	Panmud Perdata	1	-	1	-	-	1	-	-	-
6	Panmud Pidana	-	1	1	-	-	1	-	-	-



7	Panmud Hukum	1	-	1	-	-	1	-	-	-
8	Panitera Pengganti	1	1	2	-	-	2	-	-	-
9	Jurusita	1	-	1	-	-	1	-	-	-
10	Jurusita Pengganti	3	-	3	-	-	2	-	1	-
11	Pelaksana Kewanitaraan	9	4	13	-	-	12	1	-	-
TOTAL		23	6	29	-	3	24	1	1	-

Tabel 12 : SDM Bidang Non Teknis berdasarkan Pendidikan

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Pendidikan						
		L	P		S-3	S-2	S-1	D3	SMA	SMP	
1	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kapala Sub Bagian	1	2	3	-	-	3	-	-	-	
3	Pranata Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Arsiparis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pustakawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Staf Kesekretariatan	-	2	2	-	-	2	-	-	-	
TOTAL		1	4	5	-	-	5	-	-	-	

Tabel 13 : Jumlah Pesonil Pengadilan Negeri Situbondo

NO	Satker	SDM		Jumlah
		Tehnis	Non Tehnis	
1.	Pengadilan Negeri Situbondo	29	5	34

Sedangkan untuk jumlah jabatan yang kosong Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 14 : Jumlah Jabatan Kosong

NO	PENGADILAN	TYPE PT / KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM	STRUKTURAL KEPANITERAAN		PP	KEJURUSITAAAN		STRUKTURAL SEKRETARIAT		FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH
			KETUA PN	WAKIL KETUA PN		PANITERA	PANMUD		JURUSITA	JURUSITA PENGANTI	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN			
1	PN Situbondo	IB	0	0	0	0	0	5	0	1	1	0	4	10	21



Pada Tahun 2024 terdapat 3 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo. Adapun perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15 : Perbandingan Majelis Hakim Dan Fungsional Kepaniteraan Serta Beban Kerja / Perkara Yang Harus ditangani Tahun 2024

PENGADILAN	Jumlah		Perbandingan	Sesuai Aturan	Jumlah Perkara Tahun 2024			Jml Majelis Hakim	Beban Kerja Tiap Majelis Hakim Per-Bulan
	Hakim	Kepaniteraan			Pidana	Perdata	Jumlah		
PN Situbondo	6	7	1:3	Tidak	Pid.B & Pid.Sus =248 Pid.Pra =2 Pidana Cepat = 76 Pid.Sus. Anak =10 Lalu Lintas = 2081	Pdt.G =72 Pdt.P =81 Pdt.GS=22 Pdt.Plw=8 Konsinyasi : 3	522	3	15

Tabel 16 :Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata Dalam Se Bulan Per Tiap Majelis Hakim Pada Tahun 2024

NO	PENGADILAN	JUMLAH		PERKARA TAHUN 2023			BEBAN KERJA
		HAKIM	MAJELIS	PIDANA	PERDATA	JUMLAH	
1	PN. Situbondo	6	3	336	186	522	15

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa perbandingan majelis hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun 2024 tidak sesuai dengan aturan. Berdasarkan Buku I Mahkamah Agung Tahun 2007, Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB untuk jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Kelas IB harusnya 14 orang sedangkan saat ini di Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 6 orang termasuk Ketua Pengadilan Negeri. Jumlah Panitera Pengganti idealnya untuk Pengadilan Negeri Tingkat



Pertama Kelas IB berjumlah 20 orang sedangkan pada Tahun 2024 di Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 7 orang, termasuk Panitera dan Panitera Muda. Jumlah Jurusita idealnya untuk Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Kelas IB berjumlah 4 orang sedangkan di Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 1 orang. Jumlah Jurusita Pengganti idealnya untuk Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Kelas IB berjumlah 8 orang sedangkan saat ini di Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 3 orang.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B pada tahun 2024 **berdasarkan pangkat dan golongan ruang** adalah sebagai berikut:

Tabel 17 : Daftar ASN berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	NAMA NIP	Pangkat/Golongan	TMT Golongan	Jabatan
1	Achmad Rasjid, S.H. 197409152000031001	Pembina Utama Muda IV/c	2024-10-01	Ketua
2	Haries Suharman Lubis, S.H., M.H. 197703272001121002	Pembina Tingkat I IV/b	2022-04-01	Wakil Ketua
3	I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. 197607132002121001	Pembina Tingkat I IV/b	2023-04-01	Hakim Tingkat Pertama
4	Rosihan Luthfi, S.H. 197701132002121003	Pembina IV/a	2021-04-01	Hakim Tingkat Pertama
5	Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H. 198002042007041002	Pembina IV/a	2023-04-01	Hakim Tingkat Pertama
6	I Ketut Sueca, S.H. 196907061992031002	Pembina IV/a	2024-04-01	Panitera
7	I Made Muliarta, S.H. 198203142008051001	Pembina IV/a	2024-10-01	Hakim Tingkat Pertama,
8	Khudzaifah, S.H. 196705151989032015	Penata Tingkat I III/d	2007-10-01	Panitera Muda Pidana
9	Iwan Mulyono, S.H. 196905141989031001	Penata Tingkat I III/d	2013-10-01	Kepala Subbagian, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
10	Haryono, S.H. 197010161993031002	Penata Tingkat I III/d	2013-10-01	Panitera Muda Perdata
11	Abd. Mukti, S.H. 196606271993031005	Penata Tingkat I III/d	2017-04-01	Panitera Muda Hukum
12	Ferry Irawan, S.H. 196804101996031002	Penata Tingkat I III/d	2008-04-01	Panitera Pengganti, Panitera
13	Ahmad Saifi, S.H. 197009082000121002	Penata Tingkat I III/d	2013-04-01	Juru Sita
14	Intan Mustika Atmaningrum, S.H. 198405282005022001	Penata Tingkat I III/d	2022-04-01	Kepala Subbagian, Subbagian Umum dan Keuangan
15	Diah Wahyu Sulistiyo Ningrum, S.H. 198512242008052001	Penata III/c	2024-10-01	Kepala Subbagian, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana



NO	NAMA NIP	Pangkat/Golongan	TMT Golongan	Jabatan
16	Rochimatun, S.H. 198309142002122001	Penata Muda Tk. I III/b	2023-04-01	Panitera Pengganti
17	Shofil Setyarini, S.Sos. 199309142019032016	Penata Muda Tk. I III/b III/b	2023-04-01	Operator - Penata Layanan Operasional
18	David Julianus Saruksuk, S.H. 199507072022031010	Penata Muda III/a	2022-03-01	Klerek - Analisis Perkara Peradilan / Cakim
19	I Gede Adi Wijaya, S.H. 198911292022031003	Penata Muda III/a	2022-03-01	Klerek - Analisis Perkara Peradilan / Cakim
20	Azlan Syahrozi Daulay, S.H. 199404222022031007	Penata Muda III/a	2022-03-01	Klerek - Analisis Perkara Peradilan / Cakim
21	Madelleina Anindita Eriesta Elen, S.H. 199503052022032007	Penata Muda III/a	2022-03-01	Klerek - Analisis Perkara Peradilan / Cakim
22	Ivan Prana Putra, S.H. 199605122022031004	Penata Muda III/a	2022-03-01	Klerek - Analisis Perkara Peradilan / Cakim
23	Muhammad Afif Muhaimin, S.H. 199801122022031003	Penata Muda III/a	2022-03-01	Klerek - Analisis Perkara Peradilan / Cakim
24	Ilham Rahmansyah, S.H. 199709112022031010	Penata Muda III/a	2022-03-01	Klerek - Analisis Perkara Peradilan / Cakim
25	Mokoari Simamora, S.H. 199311172022031004	Penata Muda III/a	2022-03-01	Klerek - Analisis Perkara Peradilan / Cakim
26	Rad Fathir Sandimula, S.H. 199504182022031006	Penata Muda III/a	2022-03-01	Klerek - Analisis Perkara Peradilan / Cakim
27	Rizal Antonie, S.H. 197405152014081001	Penata Muda III/a	2022-04-01	Juru Sita Pengganti, Panitera
28	Arif Hidayat, S.H. 197809022014081002	Penata Muda III/a	2022-04-01	Juru Sita Pengganti, Panitera
29	Anis Ismatun Nisa', S.H. 199705172024052001	Penata Muda III/a	2024-05-01	Klerek - Analisis Perkara Peradilan / CPNS
30	Anis Rukmawati, S.H. 199903242024052001	Penata Muda III/a	2024-05-01	Klerek - Analisis Perkara Peradilan / CPNS
31	Bidari Afa Sinarizqi, S.H. 199910092024052001	Penata Muda III/a	2024-05-01	Klerek - Analisis Perkara Peradilan / CPNS
32	Gunung Rikayat, 197106151993031003	Pengatur Tingkat I II/d	2023-10-01	Juru Sita Pengganti
33	Torang Muda Situngkir, A.Md. 199304152022031010	Pengatur II/c	2022-03-01	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
34	Annisa Reza Nur, A.Md. 199609152022032010	Pengatur II/c	2022-03-01	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Umum dan Keuangan

Tabel 18 : Rekap Jumlah ASN berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	Jabatan	Golongan IV					Golongan III				Golongan II			
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Ketua	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wakil Ketua	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hakim	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Panitera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Panmud Perdata	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Panmud Pidana	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8	Panmud Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-



9	Kasub Bag. PTIP	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
10	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
11	Kasub Bag. Kepegawaian dan Ortala	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
12	Panitera Pengganti	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
13	Jurusita	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
14	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	
15	Pelaksana Kepaniteraan	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	1	-	
16	Pelaksana Kesekretariatan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
TOTAL		4	2	1	-	-	14	2	1	7	-	-	2	1

Sedang daftar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 19 : Daftar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Achmad Rosyidi,S.H .	S-I	Sopir
2	Faris Zainul Anwar,Amd.	D-3	Pramubakti
3	Junaidi	SMA	Petugas Satpam
4	Sholeh Hadi Prayitno	SMA	Pramubakti
5	Mohammad Zofi	S-I	Petugas Satpam
6	Dani Dhiman, S.,S.E.	S-I	Sopir
7	Amirul Hadi	S-I	Pramubakti
8	Hadi Prasetyo, S. Pd.	S-I	Pramubakti
9	Rosa Fitriyana,S Ak.	S-I	Pramubakti



A. M U T A S I

Terdapat beberapa SDM pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B yang mutasi pada Tahun 2024, baik mutasi masuk maupun mutasi keluar. Adapun Hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Situbondo yang mutasi masuk yaitu sebagai berikut:

Tabel 20 : Daftar Mutasi Masuk

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	Haries Suharman Lubis, SH.MH.	Wakil Ketua PN.Manukwari	Wakil Ketua PN.Situbondo	1796/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023, Tgl. 6 -11-2023 , TMT 19-1-2024
2	Ilham Rahmansyah, S.H	Klerek-Analis Perkara Peradilan PA. Donggala	Cakim PN.Situbondo	244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024, Tgl. 02 Maret 2024, TMT 05-02-2024
3	Mokoari Simamora, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan PN. Poso	Cakim PN.Situbondo	244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024, Tgl. 02 Maret 2024, TMT 05-02-2024
4	Rad Fathir Sandimula, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PA. Kota Mubagu	Cakim PN.Situbondo	244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024, Tgl 02 Maret 2024, TMT 05-02-2024
5	David Agustusanus Saruksuk, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN. Andoolo	Cakim PN.Situbondo	244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024, Tgl 02 Maret 2024, TMT 05-02-2024
6	I Gede Adi Wijaya, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PA. Parigi	Cakim PN.Situbondo	244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024, Tgl 02 Maret 2024, TMT 05-02-2024
7	Azlan Syahrozi Daulay, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PA. Luwuk	Cakim PN.Situbondo	244/SEK/SK.KP4.1.3/I/2024, Tgl 02 Maret 2024, TMT 05-02-2024
8	Ivan Prana Putra, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN. Raha	Cakim PN.Situbondo	244/SEK/SK.KP4.1.3/I/2024, Tgl 02 Maret 2024, TMT 05-02-2024
9	Muhammad Afif Muhaimin, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PA. Bungku	Cakim PN.Situbondo	244/SEK/SK.KP4.1.3/I/2024, Tgl 02 Maret 2024, TMT 05-02-2024



10.	Khudzaifah, S.H.	Panmud Hukum PN Banyuwangi	Panmud Pidana PN Situbondo	641/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024 tanggal 22 April 2024, TMT 30-05-2024
11.	Rochimatun, S.H.	Jurusita PN Banyuwangi	Panitera Pengganti PN Situbondo	1104/DJU/SK.KP4.1.3/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, TMT 29-11-2024

Sedangkan Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Situbondo yang mutasi keluar adalah sebagai berikut :

Tabel 21 : Daftar Mutasi Keluar

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	Slamet Ridwan S.E,S.H., M.Hum.	Panmud Pidana PN Situbondo	Panmud Pidana PN Banyuwangi	641/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024 tanggal 22 April 2024, TMT 30-05-2024
2	Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.	Panitera Pengganti PN Situbondo	Panitera Pengganti PN Jember	105/DJU/SK/KP4.1/3/X/2024 Tgl. 18 Oktober 2024, TMT 05-12-2024
3	Sugianto, S.H	Panitera Pengganti PN Situbondo	Panitera Pengganti PN Jember	105/DJU/SK/KP4.1/3/X/2024 Tgl. 18 Oktober 2024, TMT 02-12-2024

B. PROMOSI

Jenis promosi terbagi menjadi 2 yaitu promosi jabatan dan promosi pangkat. Aparatur Pengadilan Negeri Situbondo yang mendapatkan promosi jabatan pada Tahun 2024 yaitu:

Tabel 22 : Daftar Promosi Jabatan

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Ket.
1	Diah Wahyu Sulistiyo Ningrum, S.H.	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Situbondo	2654/SEK/SK.KP4.1.3/IV/2024 Tgl. 29 April 2024, TMT 15 Mei 2024

Adapun Aparatur Pengadilan Negeri Situbondo yang mendapatkan promosi pangkat pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 23 : Daftar Promosi Pangkat

No	Nama	TMT	Jabatan	Pangkat Lama	Pangkat Baru
1	I KETUT SUECA, SH 19690706 1992031 002	1 Apr 2024	Panitera	Penata Tingkat I (III/d)	Pembina (IV/a)



2	SUGIANTO, S.H. 196708081989031006	1 Apr 2024	Panitera Pengganti	Penata Tingkat I (III/b)	Penata (III/c)
3	ACHMAD RASJID, S.H. 197409152000031001	1 Okt 2024	Ketua	Pembina Tingkat I (IV/b)	Pembina Utama Muda (IV/c)
4	IMADE MULIARTHA, S.H. 198203242008051001	1 Okt 2024	Hakim	Penata Tingkat I (III/d)	Pembina (IV/a)
5	DAH WAHYU SULISTIYO NINGRUM, S.H. 19851224 2008052001	1 Okt 2024	Kasub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	Penata Tingkat I (III/b)	Penata (III/c)

C. PENSIIUN

Pada Tahun 2024 ini terdapat Aparatur Pengadilan Negeri Situbondo yang telah menyelesaikan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau purna tugas. Berikut adalah Aparatur Pengadilan Negeri Situbondo yang telah mencapai batas usia pensiun (BUP).

Tabel 24 : Daftar BUP

NO	NAMA/NIP	Jabatan	Keterangan
1	Annang Mardiyanto, S.H. 19660113 199303 1 005	Kasubag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana	Pensiun (SK Sekma No 00881/13001/AZ/11/23, TMT 01-02-2024
2	Sri Retnaningsih 19640228 198503 2 003	Panitera Pengganti	Pensiun(SK Sekma No 008976/13001/AZ/12/23 TMT 01-03-2024
3	Sutoto Winarno, S.H. 19660521 199603 1 001	Sekretaris	Pensiun (SK Sekma No. 00224/13001/AZ/IV/24 tanggal 4 April 2024) TMT 01-06-2024
4	Arif Bakhtiar, S.H. 19640715 199403 1 003	Panitera Pengganti	Pensiun (SK Plt. Sekma 00382/13001/AZ/VI/24 TMT 01-08-2024

D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta meningkatkan kinerja dan efisiensi di tempat kerja, Pengadilan Negeri Situbondo mengikutsertakan Aparaturnya dalam pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI maupun instansi terkait, baik teknis maupun non teknis.



Adapun pegawai yang mengikuti diklat teknis dan non teknis adalah sebagai berikut:

Tabel 25 : Daftar Diklat Tahun 2024

No	Nama Diklat	Tanggal	Penyelenggara	Peserta
1	Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim dan Panitera Pengadilan Tk. Pertama Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, Denpasar, Samarinda dan Banjarmasin	Tahap I (Mandiri E-learning) : 5 s.d. 7 Desember 2024 Tahap II (Penyampaian materi) : 9 s.d. 14 Desember 2024	Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan	1. Achmad Rasjid, S.H. 2. I Ketut Sueca, S.H.
2	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	4 sampai dengan 6 November 2024	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Haries Suharman Lubis, S.H., M.H,
3	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilu Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	26 Januari 2024 - 06 Februari 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan MARI	Rosihan Luthfi, S.H.
4.	Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan umum Angkatan IV Gelombang III Seluruh Indonesia	30 September 2024 - 22 November 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan MARI	1. I Gede Adi Wijaya, S.H. 2. David Julianus Saruksuk, S.H. 3. Azlan Syahrozi Daulay, S.H. 4. Madelleina Anindita Eriesta Elen, S.H. 5. Ivan Prana Putra, S.H. 6. Muhammad Afif Muhaimin, S.H. 7. Ilham Rahmansyah, S.H. 8. Mokoari Simamora, S.H. 9. Rad Fathir Sandimula, S.H.
5.	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan V Tahun 2024	28 Oktober 2024 - 01 November 2024	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan	Shofil Setyarini, S.Sos.



6.	Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara	11 – 13 November 2024	Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	Intan Mustika Atmaningrum, S.H.
7.	Bimtek Refreshment Bendahara Penerimaan	30 Oktober 2024	KPPN Bondowoso	Rizal Antonie, S.H.

The background of the page is an abstract design consisting of multiple overlapping, wavy lines in various shades of blue, ranging from light sky blue to a deeper cerulean. These lines flow across the page, creating a sense of movement and depth. The overall effect is clean, modern, and professional.

BAB IV

**PENGELOLAAN KEUANGAN,
SARANA DAN PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI**



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

A.1. DIPA 01 (098221)

Dalam tahun 2024 secara keseluruhan anggaran yang dikelola Pengadilan Negeri Situbondo dalam **DIPA 01 (098221)** adalah sebesar Rp. 5.548.719.000 (Lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai :
 - Pagu Anggaran : Rp. 4.030.382.000,00
 - Realisasi : Rp. 4.006.344.612,00 (99.40 %)
 - Sisa Anggaran : Rp. 24.037.388,00 (0,6 %)
2. Belanja Barang :
 - Pagu Anggaran : Rp. 1.518.337.000,00
 - Realisasi : Rp. 1.511.713.658,00 (99.56 %)
 - Sisa Anggaran : Rp. 6.623.342,00 (0,44 %)
3. Belanja Modal :
 - Pagu Anggaran : Rp. 0

Dari keseluruhan anggaran yang dikelola tersebut, realisasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang (belanja pemeliharaan dan perjalanan) serta belanja modal Pengadilan Negeri Situbondo dari DIPA 01 tahun 2024 adalah Rp. 5.518.058.270,00 (Lima milyar lima ratus delapan belas juta lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), atau 99.45 % dari total anggaran DIPA Pengadilan Negeri Situbondo sebesar Rp. 5.548.719.000,00 (Lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).



Tabel 26 : Realisasi Belanja DIPA 01

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Pegawai	4.030.382.000,00	4,006,344,612,00	99.40 %	24,037,388,00	0,6 %
Barang	1,518,337,000,00	1,511,713,658,00	99.56 %	6,623,342,00	0,44 %
Modal	0	0		0	
Total	5,548,719,000	5,518,058,270	99.45 %	30,660,730	(1,04%)

A.2. DIPA 03 (099146)

Dalam tahun 2024 secara keseluruhan anggaran yang dikelola Pengadilan Negeri Situbondo dalam **DIPA 03 (099146)** adalah sebesar Rp. 87.940.000 (Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari

1. Belanja Manajemen Peradilan Umum :
 - Pagu Anggaran : Rp. 87.940.000,00
 - Realisasi : Rp. 87.605.995,00 (99.62%)
 - Sisa Anggaran : Rp. 334.005,00 (0,38%)

Tabel 27 : Realisasi Belanja DIPA 03

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Barang	58,440,000,00	58,105,995,00	99.43 %	334,005,00	0,38%
Kimwasmat	1.500.000,00	1.500.000,00	100 %	0	0 %
Posbakum	28.000.000,00	28.000.000,00	100 %	0	0 %
Total	87,940,000,00	87,605,995,00	99.62%	334,005,00	0,38%



B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Selain didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas yang mempunyai integritas dan dedikasi tinggi serta kuantitas cukup, juga perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan layak.

Selama ini sarana dan prasarana yang ada masih sangat terbatas dan kurang memadai, sehingga mutlak adanya peningkatan/penambahan guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib, rapi dan nyaman yang pada akhirnya mampu mewujudkan suatu penyelesaian tugas dengan efektif dan efisien sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Situbondo digunakan untuk kepentingan gedung kantor Pengadilan, serta rumah dinas jabatan. Tanah yang dikelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 : Daftar Tanah

No	Lokasi Tanah	Luas Tanah (M2)	Keterangan
1.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	7715	Tanah Kantor Bersertifikat No.32/1984. Pemerintah RI. Cq. MARI
2.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	753	Tanah Gedung Kantor (Lantai 1)
3.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	153	Tanah Gedung Kantor (Lantai 2)
4.	Jl. Pelabuhan No. Desa dan Kec. Asembagus, Kab. Situbondo	1480	Tanah Kantor Balai sidang Bersertifikat No. 6/1984. Pemerintah RI. Cq. MARI
5.	Jl. Pelabuhan No. Desa dan Kec. Asembagus, Kab. Situbondo	328	Tanah Gedung Balai Sidang Asembagus
6.	Jl. Desa dan Kec. Besuki, Kab. Situbondo	1080	Tanah Kantor Balai sidang Bersertifikat No. 13/1984. Pemerintah RI. Cq. MARI.
7.	Jl. Desa dan Kec. Besuki, Kab. Situbondo	328	Tanah Gedung Balai Sidang Besuki



Tabel 29 : Daftar Gedung dan Bangunan

NO	Sarana Prasana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Tamu Pimpinan	1	
3	Ruang Wakil Ketua	1	
4	Ruang Hakim	1	
5	Ruang Panitera	1	
6	Ruang Sekretaris	1	
7	Ruang Sidang Umum	2	R. Sidang utama
8	Ruang Sidang Anak	1	
9	Ruang Pidana	1	
10	Ruang Perdata	1	
11	Ruang Hukum	1	
12	Ruang Panitera Pengganti	1	
13	Ruang Umum dan Keuangan	1	
14	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
15	Ruang PTIP	1	
16	Ruang Dharmayukti	1	
17	Ruang Tamu Terbuka	1	
18	Ruang Mediasi	1	
19	Ruang PTSP	1	
20	Ruang Tunggu PTSP	1	
21	Ruang Tahanan Anak	1	
22	Ruang Poliklinik dan Laktasi	1	
23	Ruang Media center / Teleconference	1	
24	Ruang Arsip	1	
25	Ruang Perpustakaan	1	
26	Ruang Jaksa	1	
27	Ruang Posbakum	1	
28	Ruang Tahanan laki – laki	1	
29	Ruang Tahanan Perempuan	1	
30	Ruang Ramah Anak	1	
31	Mushollah	1	
32	Pos Satpam	1	
33	Toilet Ketua	1	
34	Toilet Hakim	1	
35	Toilet Pegawai	1	
36	Toilet Difabel	1	
37	Toilet Umum / Pengunjung	3	



2. Rumah Dinas

Tabel 30 : Daftar Rumah Dinas

No	Alamat	Kondisi	Luas Tanah & Bangunan	Peruntukan	Sertifikat	Keterangan
1.	Jl.PB.Sudirman No. 97	Baik	285 / 197	KPN	MARI	Ditempati / Type 45
2.	Jl.PB.Sudirman No. 97	Baik	323/ 68	WKPN	MARI	Ditempati/ Type 36
3.	Jl.PB.Sudirman No. 97	Baik	323 / 68	Hakim	MARI	Ditempati/ Type 36
4.	Jl.Argopuro No.18	Rusak Berat	420/191,25	Panitera	MARI	Kosong/ Type 45
5.	Jl.Santana No.1	Rusak Ringan	390/ 123,5	Hakim	MARI	Ditempati/ Type 45
6.	Jl.P.B.Sudirman Gg.Lumbung 1	Baik	290 / 97	Hakim	MARI	Ditempati / Type 36
7.	Jl.P.B.Sudirman Gg.Lumbung 2	Baik	290 / 97	Hakim	MARI	Ditempati/ Type 36

3. Kendaraan Dinas Roda empat dan dua

Tabel 31 : Daftar Kendaraan Dinas

No	Jenis/Merk	Tahun	No.Pol	Kondisi	Pengguna	Asal Perolehan
1.	K. Innova	2017	P 1218 EP	Baik	KPN	Pinj.Pakai
2.	K. Innova E.xw4	2009	P 1327 EH	Baik	WKPN	APBN
3.	D. Terrios TX	2012	P 1439 EP	Baik	Panitera	APBN
4.	D. Terrios TS	2011	P 1435 EP	Baik	Sekretaris	APBN
5.	Honda NF 125D	2008	P 5592 EP	Rusak Berat	Ka.Sub.Bag,Umm dan Keuangan	APBN
6.	Honda NF 125 TD	2008	P 2446 EP	Rusak Berat	Ka.Sub. PTIP	APBN
7.	Honda GL.Pro.160	2006	P 5784 EP	Rusak Berat	Pan.Mud. Perdata	APBN
8.	Honda GL.Pro.160	2006	P 5783 EP	Rusak Berat	Pan.Mud Hkm.	APBN



9	Honda GL.Max125	2003	P 3041 EP	Rusak Berat	Juru Sita Pengganti	APBN
10	Suzuki RC.100	1996	P 3393 EP	Rusak Berat	Umum	APBN
11	Suzuki A .100	1982	-	Rusak Berat	-	APBN

4. Meubelair / Inventaris Kantor

Tabel 32 : Daftar Inventaris Kantor

No	Nama Peralatan	Jumlah	Asal Perolehan	Ket
1	Meja Kerja Kayu	74	DIPA	
2	Bangku Panjang kayu	28	DIPA	
3	Kursi kayu	41	DIPA	
4	Podium	1	DIPA	
5	Almari Kayu	19	DIPA	
6	Kursi tamu/Sice	5	DIPA	
7.	Kursi Fiber glass	70	DIPA	
8.	Buffet Buku	2	DIPA	
9.	Meja Rapat	3	DIPA	
10	Meja Telpon	1	DIPA	
11	Mesin Absensi	1	DIPA	
12.	Kursi Metal/besi	107	DIPA	30 rusak
13	Lemari Besi	17	DIPA	

5. Peralatan dan Mesin

Tabel 33 : Daftar Peralatan dan Mesin

No	Nama Peralatan	Jumlah	Asal Perolehan	Ket
1	Komputer (Personal Computer)	15	DIPA	
2	Komputer (Personal Computer Lainnya)	13	DIPA	
3	Laptop	21	DIPA	
4	Note Book	7	DIPA	



5	Infokus/LCD	1	DIPA	
6	CCTV (Camera Control Television System)	4	DIPA	
7	LCD Monitor	2	DIPA	
8	Mesin Ketik Manual	29	DIPA	Rusak
9	Mesin Ketik Elektrik	2	DIPA	Rusak
10	Scanner	8	Transfer Masuk MARI 4 buah	
11	AC Split	28	DIPA	
12	Faximile	1	DIPA	Rusak
13	Brangkas	2	DIPA	
14	Filling Kabinet Besi	5	DIPA	1 Rusak
15	Mesin Absen	1	DIPA	Rusak
16	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	DIPA	
16	Sound System	1	DIPA	Rusak sedang
17	Server	3	DIPA	1 Rusak
18	Modem	1	DIPA	
19	Pelalatan Jaringan Lainnya	2	DIPA	
20	Printer	17	Transfer Masuk MARI 2 buah	
21	Printer Merk HP plus scan	2	DIPA	2 unit belanja modal
22	Internet	5	DIPA	
23	Pesawat Telepon	1	DIPA	Rusak
24	Porteble Router	1	DIPA	
25	Uninterruptible Power Suplly (UPS)	4	Transfer	MARI
26	Komputer Jaringan Lainnya (Vestouch Interactive Android Kiosk 21,5)	1	Transfer	MARI
27	Genset commis 80 Kva/ 64.000 va	1	DIPA	
28	LoudSpeker Hardweell	4	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
29	LCD Monitor TV samsung 50 inc	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
30	Microphone	7	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
31	Audio Mixing Consule	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
32	Camera Conference	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
33	Uninterruptible Power Supply UPS	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
34	Bracket Standing peralatan	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang



				elektronik
35	Rak server	1	DIPA	
36	Scanner Fujitsu FU-8150	2	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data
37	Printer Epson Ecotank L1210	2	Transfer Masuk MARI 2024	Alat Pengolah data
38	Scaner HP Pro 2000 S2	2	Transfer Masuk MARI2024	Alat Pengolah data
39	Scaner Panasonic KV-SL1056	2	Transfer Masuk MARI2024	Alat Pengolah data

6. Sarana dan Prasarana Gedung

+ Pemeliharaan Gedung Kantor:

Pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB dengan skala prioritas dan perawatan secara rutin, Sebesar Rp. 301.799.000 (tiga ratus satu juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), yaitu :

1. Perbaikan / renovasi di Ruang sidang anak
 - ✓ Penggantian kulit dinding bagian belakang dengan Hpl Rp. 24.000.000
 - ✓ Penggantian kulit dinding bagian samping kanan kirim, pemasangan gypsum, pengecatan plafon, pemasangan Wallpaper depan , penggantian lampu dowled 24.908.000.
2. Perbaikan / renovasi ruang tahanan Anak
 - ✓ Penggantian kulit dinding keramik, lantai keramik, pemasangan trails jendela dan pintu, pengecatan kusen, pengecatan pofon Hpl Rp. 24.817.177
 - ✓ Pembuatan kamar mandi dan sanitasi ruang tahanan anak Rp 24.964.000
3. Pengecatan sebagian gedung Rp. 47.546.300
 - ✓ Pengecatan tembok dan Plafon bagian dalam R. Tahanan laki-laki
 - ✓ Pengecatan Pintu Besi R tahanan laki-laki
 - ✓ Pengecatan tembok dan plafon bagian dalam R. Tahanan perempuan
 - ✓ Pengecatan Pintu Besi pintu masuk pengunjung sidang
 - ✓ Pengecatan Pagar Besi samping kanan dan kiri R, sidang Utama



- ✓ Pengecatan dan penggantian kulit dinding keramik , lantai kelamik , pemasangan tralis jendela dan pintu , pengecatan kusen , pengecatan plafon Hpl Rp. 24.817.177
 - 4. Pemeliharaan / penggantian lantai dengan granite dan Pengecatan pada Ruang Wakil Ketua 24.849.000
 - 5. Pemeliharaan / Pengecatan (Gedung dan Kusen dan besi) pada Gedung Pengadilan Negeri Situbondo. Rp. 51.209.000
 - 6. Pemeliharaan/penggantian lantai dengan granite dan Pengecatan Teras lantai 2 dan pengecatan Kusen Ruang Sidang Utama gedung 24.905. 000
 - 7. Pemeliharaan / Pengelupas dinding diganti HPL dan Wallpaper diruang Ketua dan pengecatan plafon
- Dan perbaikan lain-lain

✚ Pemeliharaan Rumah Dinas

Perbaikan yang dilakukan pada masing-masing unit rumah dinas :

1. Pengelupan Dinding dengna karamik 1 Kamar dan pengecatan sebagian (P.B. Sudirman GG Lumbung I)
2. Pengecatan dan perbaikan plafon yang rusak dan genteng serta pintu kamar mandi (P.B. Sudirman GG Lumbung 2)
3. Pengelupan Dinding dengna karamik 1 Kamar mandi dan dan penggantian pintu kamar mandi pengecatan sebagian (P.B. Sudirman)
4. Pengecatan dinding dan plafon , perbaikan talang yang rusak (P.B. Sudirman),
5. Pengecatan dinding dan plafon perbaikan talang yang rusak dan Pengecatan perbaikan bagian dapur pemadatan dengan semen (PB. Sudirman)
6. Pengecatan dinding dan plafon , perbaikan talang yang rusak dan pemadatan dengan semen (Jl. Santana)
7. Pengecatan dinding bagian dan perbaikan genteng yag rusak dan pemasangan lampu (Jl. Argupuro)

✚ Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor

Pembelian BBM alat potong rumput dan alat – alat yang terkait dengan halaman kantor serta pembelian bunga taman.



Penghapusan

Untuk tahun 2024 tidak ada penghapusan terhadap sarana dan prasarana gedung.

7. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pengadaan :

Dalam DIPA Tahun 2024 tidak ada tetapi ada transfer barang masuk dari Mahkamah Agung

1. Printer Epson Ecotank L1210 (2 Unit)
2. Scanner HP Pro 2000 S2 (2 Unit)
3. Scanner Panasonic KV-SL1056 (2 Unit)

Pemeliharaan :

Pemeliharaan rutin yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan keperluan yang prioritas sehingga fasilitas dapat berfungsi dengan baik seperti : Sepeda Motor, Mobil Dinas, Komputer, Laptop, Printer, Ac Split, Instalasi Jaringan dan Inventaris Kantor.

Penghapusan :

Untuk Tahun 2024 tidak ada Penghapusan (Proses Usulan Pensetujuan Mahkamah Agung).



C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi di era modern seperti saat ini sangatlah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengadilan Negeri sebagai lembaga Pelayanan Publik di Bidang Hukum. Dengan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka Dukungan Teknologi Informasi sangat diperlukan dalam lingkungan peradilan, yaitu memberlakukan layanan informasi di Pengadilan yang diselenggarakan secara Elektronik melalui media layanan informasi dan dokumentasi secara elektronik (e-LID) atau dapat diberikan secara langsung melalui meja informasi pada pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan .

Dukungan teknologi informasi tidak hanya diperlukan untuk kepentingan layanan kepada publik, namun juga sangat diperlukan dalam percepatan proses administrasi dalam lingkungan pengadilan, hal ini diperkuat dengan adanya aplikasi administrasi mulai dari KOMDANAS, SIMARI, SIMPONI (Aplikasi yang berhubungan dengan Pajak), SIKEP (Aplikasi yang berhubungan dengan Kepegawaian) sampai dengan aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan (Aplikasi yang berhubungan dengan keluar masuknya barang).

Teknologi informasi juga telah diterapkan pada *core business* pengadilan yaitu pada bidang kepaniteraan mulai penerimaan/pendaftaran perkara sampai dengan proses persidangan secara online.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Situbondo untuk mendukung kelancaran dalam pengelolaan IT antara lain :

A. PERANGKAT LUNAK (*Software*)

1. *E-Court*

Dalam pendaftaran perkara online melalui E-Court, Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di



seluruh Pengadilan. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Layanan tersebut diantaranya : e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online), E-Litigation (Persidangan secara online). Layanan aplikasi E-Court terdiri dari:

a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

b. E-SKUM (Taksiran panjar biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

c. Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

d. E-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. Dalam hal ini Pengadilan



Negeri melakukan kerjasama dengan Bank Syariah Cabang Situbondo.

e. Pemanggilan Pihak secara online (e-Summons)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak dari Jurusita maupun Jurusita Pengganti melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.

f. E-Litigation (Persidangan secara online)

Layanan ini mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

g. Putusan secara Elektronik

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi E-Court.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 10 Juni 2022 menerbitkan Surat Edaran No 04 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court. Sejak terbitnya Surat Edaran tersebut Ketua Pengadilan Negeri Situbondo menerbitkan Surat Keputusan No. W14.U26/914/HM.02.3/07/2020 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui e-Court Pada Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 15 Juli 2020 sampai sekarang Kemudian Pengadilan Negeri Situbondo segera menindak lanjuti dengan membuka Pojok E-Court dan melakukan pendaftaran perkara perdata melalui E-Court dan tidak menerima pendaftaran perkara perdata secara manual. Selain itu Pengadilan Negeri Situbondo telah menyediakan anjungan E-Court dan menempatkan Petugas IT pada pojok E-Court untuk membantu para Pihak dalam pembuatan email (apabila belum mempunyai email) dan dalam pembuatan akun pada E-Court. Selanjutnya email dan akun tersebut disimpan pada form dan arsip digital.

Pada tahun 2024 perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Situbondo sebanyak 149 perkara dan kesemuanya didaftarkan melalui E-Court. Adapun Implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

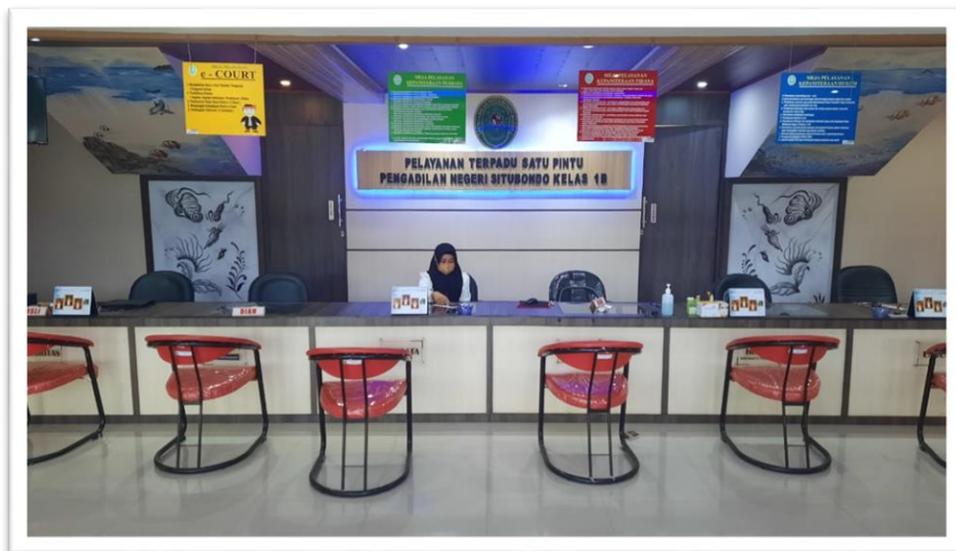
Tabel 34 : Implementasi E-Court

Nama satuan kerja	Jumlah perkara Daftar Online					SKUM (Rp)
	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total	
PN Situbondo	50	74	7	18	149	150.470.500

Ada beberapa upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan pendaftaran perkara melalui E-Court. Adapun beberapa hal yang dilakukan, diantaranya yaitu dengan menyediakan :

1) E-Court Corner

E-Court Corner merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Situbondo untuk Advokat dan pengguna lain (Non Advokat) dalam rangka pendaftaran E-Court di Pengadilan Negeri Situbondo. Pada E-Court Corner dilengkapi dengan fasilitas seperti PC dan Printer sekaligus Scanner.



Gambar 3 : Fasilitas E-Court Corner PTSP Pengadilan Negeri Situbondo

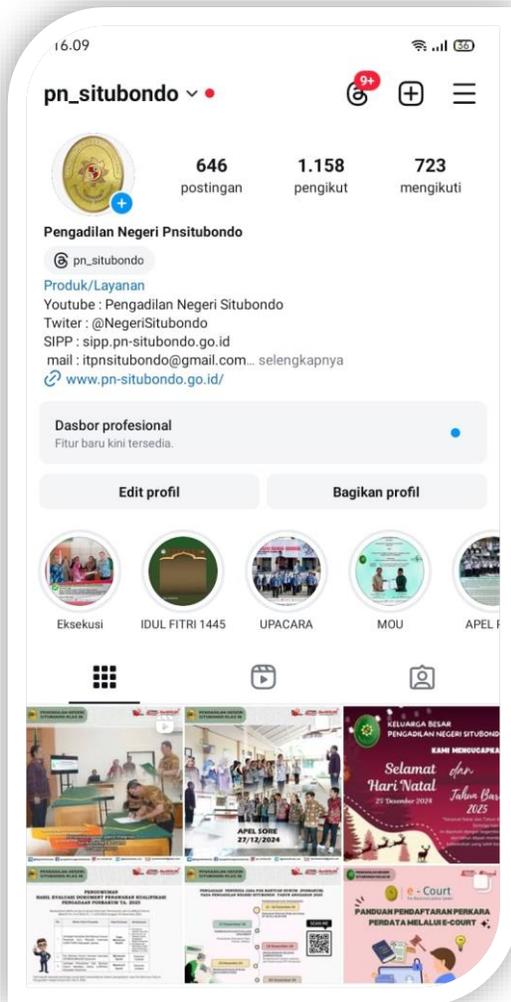
2) Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil

Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil berisi informasi berupa tampilan animasi menarik dan yang dikemas secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik melalui E-Court, alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan



yang diperlukan bagi masyarakat / pengguna layanan Pengadilan .
Dengan adanya video visual ini diharapkan mampu memberikan

pemahaman dengan mudah, bantuan, serta informasi yang jelas kepada masyarakat dalam tatacara proses mendaftarkan perkara menggunakan aplikasi E-Court secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Situbondo khususnya bagi pengguna insidentil (non advokat). Dalam era digitalisasi ini, informasi yang diberikan mengikuti perkembangan jaman dimana Informasi tidak hanya dapat di akses secara offline, namun dapat di akses secara online, baik via media sosial Instagram, facebook, Twitter dan Youtube channel



Pengadilan Negeri Situbondo, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan untuk berperkara secara elektronik. Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait bagi Pengguna layanan Pengadilan dan masyarakat pencari Pengadilan.





Gambar 4 : Media Sosial Pengadilan Negeri Situbondo

3) Leaflet E-Court bagi Pengguna Insident

Sama halnya dengan Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil, leaflet ini dibuat untuk memfasilitasi bagi pengguna yang datang langsung ke pengadilan negeri Situbondo dan bagi pengguna yang belum terbiasa menggunakan teknologi sebagai media informasi yang mereka gunakan. Leaflet tersebut berisi informasi yang dikemas secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik melalui E-Court, alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat / pengguna layanan.

Dengan adanya leaflet ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, bantuan, serta informasi yang jelas kepada masyarakat dalam tatacara proses mendaftarkan perkara

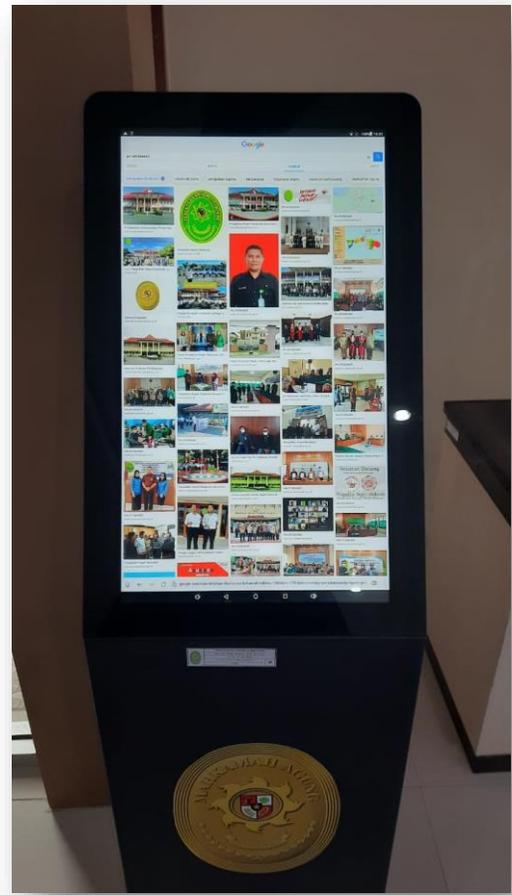


Gambar 5 : Leaflet E-Court bagi Pengguna Insidentil

menggunakan aplikasi E-Court secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Situbondo khususnya bagi pengguna insidentil (non advokat).

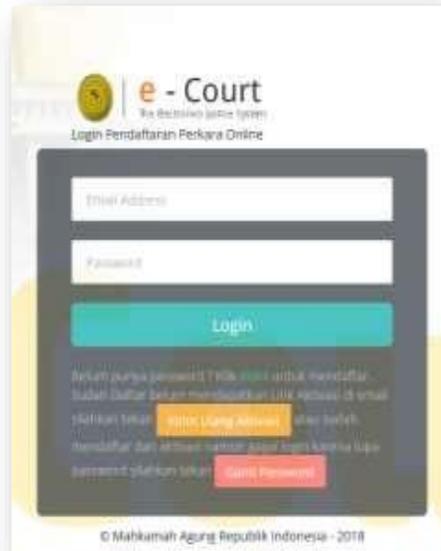
4) VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK

Adanya VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK disediakan untuk memudahkan akses informasi bagi pengunjung di Pengadilan Negeri Situbondo yang akan mencari dan melihat layanan Pengadilan antara lain jadwal sidang, Biaya panjar perkara , Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survie Persepsi Korupsi (IPK) Selain itu juga dapat dimanfaatkan bagi para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara melalui e-court , Surat Keterangan (E-raterang) dan layanan lain bagi Pengguna Pengadilan



Gambar 6 Vestouch Interactive Android Kiosk

Adanya e-court di pengadilan negeri Situbondo memungkinkan bagi pengunjung untuk mendapatkan informasi mengenai kewajiban penggunaan E-Court dan terdapat di Pelayanan E-Court melalui aplikasi <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> dan Website Pengadilan Negeri Situbondo.



Gambar 7 Tampilan Aplikasi E Court

Pada Tahun 2024 jumlah pendaftaran perkara perdata melalui aplikasi E-Court sebanyak 149 perkara yang mana rinciannya adalah sebagai berikut:

- Perkara Perdata Gugatan sebanyak 50 perkara.
- Perkara Perdata Gugatan Sederhana 18 perkara.
- Perkara Perdata Permohonan 74 perkara.
- Perkara Perdata Perlawanan/Bantahan 7 Perkara.

Dari data tersebut diatas, menunjukkan hasil yang cukup signifikan dibandingkan dengan sejak dilaunchingnya E-Court di tahun 2018 dan di tahun 2022, dimana pada tahun 2022 baru ada 180 pendaftar saja dan pada tahun 2023 ada 206 pendaftar. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo telah menunjukkan peningkatan pesat, namun ditahun 2024 menurun terkait pelaksanaan E-court yaitu 149 perkara yang telah terdaftar melalui E-Court. Pada Tahun 2024 jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui e-litigasi sebanyak 119 perkara. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo



telah menunjukkan peningkatan pelayanan yang maksimal selama tahun 2024 terkait pelaksanaan E-Litigasi.

Tabel 35 : Perbandingan Perkara Perdata Pengguna E Court

No	Perdaftaran Perkara Perdata	Masuk Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Masuk Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Aplikasi E court	180 Perkara	206 Perkara	149 Perkara

Aplikasi e-Court sendiri telah dipergunakan di Pengadilan Negeri Situbondo sejak September 2018 sampai sekarang untuk Penasehat Hukum pendaftaran perkara Perdata dianjurkan dengan pendaftaran E – Court seiring waktu Mahkamah Agung R.I dan Peradilan dibawahnya untuk pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Situbondo diharuskan melalui Aplikasi E –Court **dan semua perkara perdata Gugatan, Gugatan Sederhana , Perkara Permohonan , Perlawanan / Bantahan melalui Aplikasi E –Court**, Mahkamah Agung R.I dan Peradilan dibawahnya terus berbenah, Pada tahun 2024 semua perkara perdata menggunakan aplikasi E-Court dan mahkamah agung R.I terus berbenah serta berinovasi untuk melayani masyarakat pencari keadilan serta public agar tercapai peradilan yang sederhana , cepat dan biaya ringan , dan sampai saat ini Aplikasi E-Court untuk proses Upaya Hukum.

2. E-Berpadu

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik, serta sehubungan dengan telah diberlakukannya aplikasi e-Berpadu pada seluruh Pengadilan di Indonesia, bersama ini disampaikan kepada Lembaga Penegak Hukum (LPH) bahwa :



1. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Pusat dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH ke Mahkamah Agung RI ;
2. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Provinsi termasuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH melalui satuan kerja Pengadilan Tinggi di wilayah Hukum masing-masing;
3. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan termasuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH melalui satuan kerja Pengadilan Negeri di wilayah Hukum masing-masing Implementasi E – Berpadu di Pengadilan Negeri Situbondo Klas IB dimulai sejak tahun 2023, sebelumnya diadakan sosialisasi serta uji coba diberberapa Pengadilan Negeri kemudian setelah disempurnakan maka dapat dilaksanakan secara menyeluruh Pada peradilan Umum telah dilaksanakan monitoring dan Evaluasi oleh Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Surabaya agar Penerapannya lebih efektif dan efisien , maka pada awal tahun 2023 sampai sekarang E Berpadu telah diterapkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo .



Gambar 8 Rapat Koordinasi Kejari, Kepolisian dan Rutan



Gambar 9. Monev E Berpadu bersama Kejari, Kepolisian dan Rutan



Gambar 9a. Aplikasi e-Berpadu



3. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)



SIPP merupakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung, dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi kepada publik. Implementasi SIPP di

Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36: Implementasi Versi SIPP 31 Desember 2024

Nama Satuan Kerja	Jenis Perkara	Sisa Lalu	Masuk	Minutasi	Sisa	Keterangan Penanganan Perkara (%)
PN Situbondo	Pidana	36	212	226	22	91,1 %
	Perdata	23	149	148	24	86 %

Pengadilan Negeri Situbondo telah melakukan peningkatan kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP.

Fitur SIPP yang digunakana Versi 5.6.4 meliputi :

- ❖ Perbaikan pada Perekaman Data Putusan Verzet
- ❖ Perbaikan pada fitur Verifikasi Prodeo
- ❖ Perbaikan pada fitur Laporan Perkara Hakim (tidak menampilkan nama Hakim yang tidak aktif)
- ❖ Optimasi penyajian data pada fitur Jurnal Keuangan Perkara
- ❖ Perbaikan pada fitur Sinkronisasi Data e-Berpadu dengan SIPP
- ❖ Perbaikan pada penyajian data di Halaman Tab Eksekusi
- ❖ Perbaikan pada Perekaman Data Minutasi Perkara PHI dengan Nilai Sengketa di Bawah 150 Juta
- ❖ Penambahan Data Referensi Satuan Kerja BNN dan KPK pada fitur Referensi Penyidik
- ❖ Perbaikan pada Penomoran Perkara Eksekusi Perkara PHI
- ❖ Perbaikan pada fitur Riwayat Penahanan%

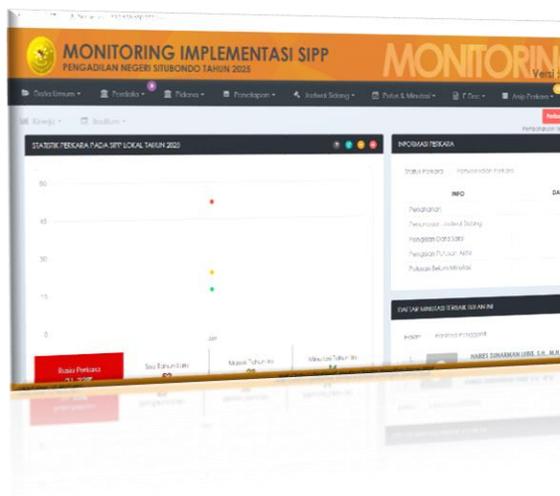


- ❖ Perbaikan pada perekaman data Izin Cerai pada Tab Data Umum
- ❖ Perbaikan pada fitur perekaman data Putusan Perkara Pra Pidana Jinayat
- ❖ Perbaikan pada perekaman data Alasan Dispensasi Kawin pada Tab Data Umum
- ❖ Perbaikan pada fungsi Pendaftaran Upaya Hukum Kasasi / PK (Tambahkan fitur Versi 5.6.4)

4. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa “pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP”, maka Satuan Tugas Sistem Penelusuran Perkara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP pada Pengadilan Negeri.

5. Evaluasi SIPP (EIS)

Adapun EIS merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran

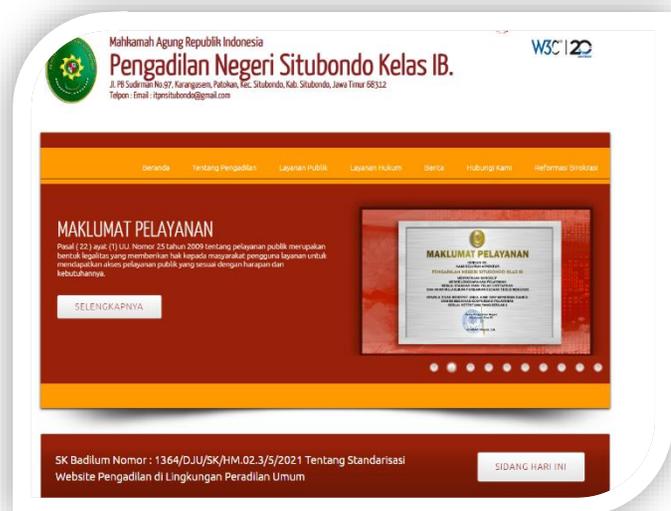


Perkara (SIPP) terhadap pengadilan di lingkungan badan peradilan umum.

No	Kategori	Subkategori	Indikator	Target	Realisasi	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit
169	1-500	II	Pengadilan Negeri Sabang	96.30%	97.84%	82.66%	99.32%	★★★★★	94.03%	(944.04)	
170	1-500	II	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	95.56%	97.27%	91.11%	91.97%	★★★★★	93.98%	(934.76)	
171	1-500	II	Pengadilan Negeri Tobelo	95.50%	95.57%	89.38%	95.32%	★★★★★	93.84%	(944.26)	
172	1-500	IB	Pengadilan Negeri Situbondo	93.85%	97.43%	90.29%	94.20%	★★★★★	93.84%	(950.69)	
173	1-500	II	Pengadilan Negeri Entrekang	92.59%	96.98%	89.62%	96.56%	★★★★★	93.84%	(944.23)	
174	1-500	II	Pengadilan Negeri Pasuruan	95.95%	96.26%	88.38%	95.11%	★★★★★	93.93%	(943.73)	
175	1-500	II	Pengadilan Negeri Waingapu	96.15%	95.43%	87.06%	97.00%	★★★★★	93.97%	(933.07)	
176	1-500	IB	Pengadilan Negeri Pamekasan	96.01%	95.24%	91.99%	92.26%	★★★★★	93.84%	(944.23)	

6. Website

Pengadilan Negeri Situbondo sudah memiliki website yang menampilkan informasi yang mengacu pada undang-undang Keterbukaan Informasi dan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Keterbukaan Informasi di Pengadilan Alamat website Pengadilan Negeri Situbondo adalah www.pn-situbondo.go.id



7. Aplikasi Sistem Inf Informasi Pengawasan (SIWAS)

SIWAS merupakan situs online whistle blowing system sebagai pelaksanaan Peraturan MA (PERMA) No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistle blowing System di MA dan Badan Peradilan di bawahnya. SIWAS diharapkan dapat membantu pengadilan memberikan pelayanan yang akuntabel, transparansi, bebas korupsi di pengadilan, terintegrasi, kerahasiaan, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum. Fitur SIWAS ini untuk menerima pelaporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun internal pengadilan mengenai



dugaan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Panitera, Jurusita dan pegawai pengadilan.

Didalam aplikasi SIWAS terdapat notifikasi status pelaporan yang dikirimkan kepada pelapor secara otomatis dapat mudah diakses



setiap kali ada perkembangan perkembangan pelaporan, dan juga terdapat inisiatif tingkat pengadilan banding dimana pengadilan tingkat banding di setiap wilayah memiliki kewenangan (dalam koordinasi dengan

Badan Pengawasan) untuk secara langsung menindaklanjuti pelaporan terhadap setiap dugaan pelanggaran aparat peradilan.

8. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi, agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna Peradilan. Untuk dapat mengelola sumber daya manusia sebanyak itu, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan pegawai yang mudah, cepat, efisien, dan efektif. Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem



informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses

dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (paper based).



Belakangan muncul kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi tersebut dengan memanfaatkannya sebagai sarana pelayanan kepegawaian. Karena itu dilakukan pengembangan dengan memasukkan fitur-fitur layanan kepegawaian seperti layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) bagi pegawai di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia, layanan ujian dinas bagi pegawai yang diselenggarakan secara online (e-Exam) dari satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan proses promosi dan mutasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terhadap pegawai di satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan data pengisian LHKPN bagi Pejabat Negara dan pegawai yang memiliki kewajiban laporan harta kekayaan, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis bagi pegawai yang memasuki purna tugas, layanan pengolahan data lainnya untuk kepentingan lembaga.

NO	NIP/NRP	NAMA	JABATAN	GOL.	DATA SAPK (UPDATE AT 10:00 WIB)	AKSI
1	197409152000031001	ACHMAD RASJID, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Situbondo TMT: 22 Desember 2022	IV/c	(tidak diisi)	[Edit] [Hapus]
2	197703272001121002	HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Situbondo TMT: 19 Januari 2024	IV/b	(tidak diisi)	[Edit] [Hapus]
3	197607132002121001	I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Situbondo TMT: 01 November 2021	IV/b	(tidak diisi)	[Edit] [Hapus]
4	198203142008051001	I MADE MULIARTHA, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Situbondo TMT: 08 Februari 2021	IV/a	(tidak diisi)	[Edit] [Hapus]
5	197701132002121003	ROSIHAN LUTHFI, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Situbondo TMT: 08 Februari 2021	IV/a	(tidak diisi)	[Edit] [Hapus]
6	198002042007041002	ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Situbondo TMT: 27 Mei 2020	IV/a	(tidak diisi)	[Edit] [Hapus]
7	190907061992031002	I KETUT SUECA, S.H.	Paritera Pengadilan Negeri Situbondo TMT: 29 Desember 2023	IV/a	(tidak diisi)	[Edit] [Hapus]
8	198705151989032015	KHUDZAIFAH, S.H.	Paritera Muda Tingkat Pertama Kelas IB, Paritera Muda Pitana Pengadilan Negeri Situbondo TMT: 30 Mei 2024	III/d	(tidak diisi)	[Edit] [Hapus]

Seiring lahirnya aplikasi-aplikasi lain di lingkungan Mahkamah Agung serta kebutuhan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIKEP lahir pemikiran untuk mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan integrasi ini, fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai karena itu aplikasi ini dalam versi terbaru yang disebut versi 4.0 telah diintegrasikan dengan sistem informasi kediklatan (Sisdiklat) dan system informasi pengawasan (Siwas). Selain itu, versi 4.0 ini sudah dilengkapi dengan dashboard yang berisikan statistik keadaan



Pegawai dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Pada tataran yang lebih ideal, integrasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Khusus untuk pelayanan kepegawaian, dalam versi 4.0 ini juga ditambahkan fitur-fitur baru, seperti layanan proses Promosi dan mutasi hingga cetak SK yang terintegrasi dalam satu sistem, layanan perhitungan biaya pindah bagi pegawai dalam proses mutasi secara otomatis, layanan absensi online, layanan bagi satuan kerja dalam hal pelaporan yang sudah diintegrasikan dalam template dan layanan mandiri bagi seluruh pegawai dalam hal administrasi kepegawaian.

9. Aplikasi SISUPER

Aplikasi Sisuper adalah aplikasi untuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) and Survey Indeks Persepsi Korupsi (SPAK). Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Situbondo mengadakan survey yang berdasarkan Surat Dirjen BADILUM tanggal 13 April 2016 Nomor :520/DJU/PS.02/4/2016, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

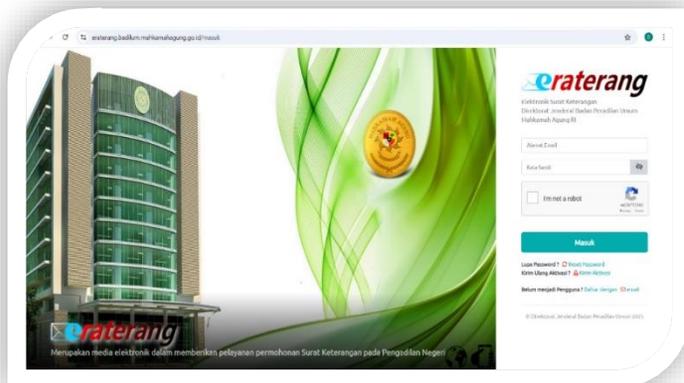
Survei pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Situbondo, diambil dengan metode kuesioner. Indeks Kepuasan Masyarakat diartikan bahwa kepuasan pelanggan saat ini di dalam hal kualitas pelayanan dapat dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan.

10. Eraterang

Aplikasi ini lebih mempermudah masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo serta untuk mendukung pembagunan Zona Integritas yang bebas dari Korupsi dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Badan



Peradilan Umum Mahkamah Agung R.1 memberikan inovasi terbaru yang diberi nama “eraterang”. Eraterang tersebut merupakan form online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo bagi Anda



yang akan mengajukan Permohonan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut

masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Situbondo. Aplikasi Eraterang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Situbondo dengan alamat <https://pn-situbondo.go.id> pada menu beranda, eraterang.

1.1. Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) +

Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah aplikasi yang mendukung pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan layanan prima terhadap para pencari keadilan pencari keadilan. Fitur - fitur yang terdapat di dalam aplikasi PTSP antara lain :

#	Tanggal Register	Nomor Agenda	Sifat Surat	Pengirim	Status	Pelaksana	Waktu	#
1	14/01/2025	26/2025	Biasa	SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI (Penyusunan dan Penyampian Dokumen SAKIP)	Pendaftaran	Pendaftaran Oleh: Rizal Antonie [Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan]	1 Hari	
2	14/01/2025	25/2025	Biasa	KEPOLISIAN RESORT SITUBONDO (Permohonan penetapan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga)	Pendaftaran	Pendaftaran Oleh: Rizal Antonie [Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan]	1 Hari	
3	14/01/2025	24/2025	Biasa	MA'RUF SYAH & PARTNERS " LAW FIRM " (Permohonan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perkara No 7/Pen.Pdt.Eks/2024/PN.J.Jo Putusan PK No 184 PK/pdt/2024 jo Putusan Kasasi MA No. 4785 K/Pdt/2022 jo Putusan Banding No 220/Pdt/2021/PT.Sby Jo Putusan	Pendaftaran	Pendaftaran Oleh: Rizal Antonie [Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan]	1 Hari	
4	13/01/2025	23/2025	Biasa	PT.BANK BRI CABANG SITUBONDO (Jawaban Surat sdr: Suparman)	Dilaksanakan	Pelaksanaan Oleh: HARYONO, S.H. [Panitera Muda Perdata]	1 Hari	

- a) Register Surat Masuk dan Surat Keluar
- b) Register Buku Tamu



c) Pembuatan Surat Keterangan Yang Sudah Terstandarisasi antara lain :

- ❖ Surat Keterangan Tidak Pernah tersangkut perkara Terpidana dan perdata
- ❖ Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
- ❖ Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan ringan atau alasan politik
- ❖ Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang
- ❖ Permohonan Ijin Penyitaan
- ❖ Permohonan ijin Persetujuan Penahanan
- ❖ Permohonan ijin persetujuan Penggeledahan
- ❖ Permohonan Pembantaran

Permohonan Ijin Besuk kepada tahanan

12. Aplikasi Online Pendukung Lainnya

- ✓ PTSP+
- ✓ <https://e-bima.mahkamahagung.go.id>
- ✓ www.komdanas.mahkamahagung.go.id
- ✓ www.sirup.lkpp.go.id
- ✓ www.lpse.mahkamahagung.go.id
- ✓ www.spanext.kemenkeu.go.id
- ✓ www.simari.mahkamahagung.go.id
- ✓ www.bappenas.go.id
- ✓ www.pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id
- ✓ www.mpn.kemenkeu.go.id
- ✓ www.digit.kemenkeu.go.id
- ✓ www.smart.kemenkeu.go.id
- ✓ www.sakti.kemenkeu.go.id
- ✓ www.sakti.kemenkeu.go.id
- ✓ www.djponline.pajak.go.id

13. Aplikasi Internal

- ✓ Sipkan (*sistem informasi paraf elektronik persuratan*)
- ✓ SilapDis (Sistem Informasi Laporan Pelaksanaan Disposisi Surat)
- ✓ Sidik (Sistem Informasi Data Induk Kepegawaian)



- ✓ Sirampung
- ✓ Suara Hadi
- ✓ Siap ANtri

2. PERANGKAT KERAS (*Hardware*)

Pengelolaan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Situbondo didukung dengan sarana pengolah data berupa 10 komputer, 12 Laptop, 12 printer, 7 Scanner, 2 Laptop layar sentuh dan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan komputer 2 orang.

a) Server



Gambar 10. BM Lenovo Manufacture System x3250 M5 Rack Server

Form Factor/Height	Rack/1U
Processor	Up to one Intel® Xeon® E3-1200 processor v3 series (quad-core), Core™ i3 series processor (quad-core), or Pentium® series processor (dual-core)
Cache/Memory	Up to 8 MB per processor/Up to 32 GB via 4 slots (UDIMM)
Media Bays	One optional optical bay for 2.5-inch model
Disk Bays	Up to 4 3.5-inch or 8 2.5-inch HDDs
RAID Support	Integrated ServeRAID C100 RAID-0, -1, (RAID-5 upgrade via Feature on Demand (FoD)), optional hardware RAID-0, -1, -10 or RAID-5, -50 or RAID-6, -60
Power Supply	1 fixed 300 W or up to 2 460 W hot-swap redundant
Hot-Swap Components	Up to 4 3.5-inch or 8 2.5-inch HDDs, 460 W hot-swap redundant
Network Interface	2 Gbps Ethernet ports standard, 2 additional Gbps Ethernet ports upgradeable via FoD
Expansion Slots	1 PCIe 3.0 x8 slot and 1 PCIe 3.0 x8 (electrical x4) slot
USB Ports	2 USB 3.0 front/4 USB 2.0 rear/1 USB 2.0 internal
Internal Storage	Up to 24 TB
Energy Efficiency	Fixed power supply compliant with 80 PLUS® Bronze/ redundant



Systems Management	power supply compliant with 80 PLUS Gold Integrated Management Module 2 (IMM2) standard with IPMI 2.0 and Serial over LAN, optional upgrade to remote presence via FoD, ServerGuide
Operating Systems Supported	Microsoft Windows Server 2012 R2/ Microsoft Windows Server 2012/Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Linux, Novell SUSE Linux, Vmware

Server ini di gunakan untuk Server aplikasi dengan Operating System Linux Centos 7 di dalamnya terinstal aplikasi Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP), Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



Gambar 11. Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 Server

Configuration Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 Server:

- 1x 8 GB DDR4-2133 unbuffered ECC, 2Rx8
- SATA controller 4-channel onboard -> for internal SATA HDDs and a max. of 1x optical drive
- Equipment of SAS HDDs requires the order of 1 corresponding SAS RAID
 - controller. A
 - separate RAID array is required for mixed configurations
- Onboard controller supports SATA RAID 0/1 on Windows and Linux Operating systems
- Integrated Remote Management Controller (iRMC S4) - 2x 1 Gb Ethernet
- 1x Rack Mount Kit F1 -CMA Slim Line
- 1x Rack Cable Arm 1U
- 1x country kit APAC/EMEA/India
- 1 x Modular SV 450W platinum hp
- ServerView Suite DVD pack incl. installation SW, management SW and serviceability SW

b) Perangkat dan Jaringan

Perangkat yang digunakan terkait jaringan komputer lokal (LAN)



adalah sebagai berikut:



Gambar 12. Perangkat Jaringan

No.	Jenis Perangkat	Merk/Type	Jumlah	Ket.
1.	Router Mikrotik	RouterboardRB 2011 iL-RM	1 unit	
2.	Switch/hub	TP-LINK (16 PORT) 100 Mbps	1 unit	
3.	Switch/hub	D-LINK DGS-1016D (16 PORT) Gigabit	1 unit	
4.	Access Point	Ruwiji AC-1300	3 unit	

Tabel 37 : Daftar Perangkat Jaringan Komputer

a) Uninterruptible Power Supply (UPS)

Pengadilan Negeri Situbondo telah memiliki rak server dan yang terdapat pada meja portable tersebut adalah meliputi 2 unit server, modem (Hypernet kecepatan 100 mbps, Bisnet 50 Mbps dan Lintas Arta Dedicated 1: 1 kecepatan 100 Mbps, 1 unit DVR CCTV (16 Port), dan 1 unit switch /hub, telah dihubungkan dengan 2 unit UPS, dengan spesifikasi sebagai berikut:



Gambar 13. Uninterruptible Power Supply (UPS)



1. Merk/Type : APC Smart UPS RT3000
Kapasitas Output Power : 3000VA
Topology : Double Conversion Online
Tahun Perolehan : 2009
2. Merk/Type : APC Smart
UPS RT3000 Kapasitas Output Power :
3000VA
Topology : Double Conversion Online
Tahun Perolehan : 2009

Namun belum seluruh perangkat komputer client terhubung dengan UPS, sehingga masih berpotensi terjadi kerusakan pada perangkat komputer client jika terjadi pemadaman listrik mendadak.

b) Bandwidth Internet

Pengadilan Negeri Situbondo berlangganan jasa internet dengan provider PT. HYPERNET , paket FO MIX 100 MBPS 1 : 1 dengan kapasitas bandwidth download 100 Mbps dan upload 100 Mbps. Dan backup menggunakan provider Bisnet dengan Kapasitas 50 Mbps Unlimited.

c) Perangkat Komputer Client

Perangkat komputer client sebagian merupakan perangkat lama dengan spesifikasi yang masih harus ditingkatkan / Upgrade :

- ❖ Sebagian besar komputer merupakan komputer lama dengan processor generasi lama yang memiliki kecepatan standar / masih rasa kurang Update dan tidak mendukung proses multitasking. Komputer tersebut akan semakin lambat jika dijalankan pada system operasi terbaru dan anti viruster baru
- ❖ Jumlah printer yang terbatas untuk Sport unit Satker Pengadilan Negeri Situbondo untuk keperluan pencetakan dokumen kantor.
- ❖ Penambahan jumlah computer atau Upgrade harus diupayakan , kerana semua kegiatan mempergunakan sistem Elektronik.

The background of the page is an abstract design consisting of multiple layers of wavy, flowing lines in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. The lines create a sense of movement and depth, with some areas appearing more saturated than others. The overall effect is clean, modern, and professional.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Bahwa Pengadilan Negeri Situbondo telah melakukan perubahan-perubahan tentang pelayanan publik dengan mengacu Visi dan Misi Mahkamah Agung yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan kantor Pengadilan Negeri Situbondo agar supaya menjadi lingkungan yang bersih, indah serta nyaman baik kepada Pegawai maupun Masyarakat umum;

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Mahkamah Agung dalam hal ini memberikan suatu penilaian atau Sertifikasi Penjaminan Mutu atau standarisasi pelayanan kepada peradilan dibawah dan berdasarkan beberapa komponen yang dinilai diantaranya, Kebersihan, sarana prasana penunjang / fasilitas, kepatuhan pelayanan, percepatan pelayanan, penyelesaian perkara melalui SIPP, sehingga memberikan pelayanan maxsimal kepada masyarakat dengan memaksimal anggaran DIPA yang ada, Pengadilan Negeri Situbondo telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Makassar pada tanggal Nopember 2017 sampai dengan Maret 2022 dengan Nilai A Exccellent dan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dievaluasi secara berkala 6 (enam) bulan sekali oleh Peradilan diatasnya yang ditunjuk / Pengadilan Tinggi Surabaya.



Gambar 14 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Berdasarkan asesmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, program Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 perlu ditingkatkan sistem dan pelaksanaannya, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, membuat program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) di lingkungan peradilan umum.

Tujuan dari sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum.

Assesment AMPUH pada Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024 oleh Tim dari Pengadilan Tinggi Surabaya.



Gambar 15. Asessment AMPUH oleh Tim Pengadilan Tinggi Surabaya

Berdasarkan assessment tersebut Pengadilan Negeri Situbondo pada Tahun 2024 memperoleh **nilai 783,81 dengan predikat “UTAMA”** sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024 berikut :





**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024**

TENTANG

**NILAI SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS,
KELAS IA, KELAS IB DAN KELAS II TAHUN 2024**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang :)

Mengingat :) dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG NILAI SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS, KELAS IA, KELAS IB DAN KELAS II TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II berdasarkan rapat Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2024


Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI
BAMBANG MYANTO

Kepada :
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



**PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024
TANGGAL 11 DESEMBER 2024**

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE	NILAI AMPUH 2024	PREDIKAT
1 s/d 233				
234 235 s/d 382	Pengadilan Negeri Situbondo	IB	783.81	UTAMA
	dst.			


Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI
BAMBANG MYANTO

Gambar 16 SK Nilai Sertifikasi AMPUH

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan berpedoman Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 77 / DJU / SK / HM02.3 / 2 / 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 44 / DJU / SK / HM02.3 / 2 / 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi PTSP+.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan Pelayanan secara terintegritas dalam satu kesatuan proses dari tahap awal sampai tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Negeri Situbondo melalui satu pintu sehingga tujuan PTSP agar proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, akuntabel, anti korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai SOP yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo.

Maka sejak 2 Januari 2018 Penyelenggaraan PTSP di Pengadilan Negeri Situbondo tetapi berkembang dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi anggaran yang ada dan diselenggarakan secara keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, akuntabel dan aksesibilitas, agar Pengadilan Negeri Situbondo dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dan publik, layanan yang diberikan meliputi :



- ❖ **Loket 1** → Sub Bagian Umum dan Keuangan melayani segala pelayanan publik yang menjadi tupoksi sub bagian Umum dan Keuangan antara lain surat masuk, penerimaan tenaga magang/praktek kerja lapang, dsb.
- ❖ **Loket 2** → Pengaduan dan Kepaniteraan Hukum, melayani segala pelayanan publik yang menjadi tupoksi Kepaniteraan Hukum. Pelayanan publik tersebut antara lain: pembuatan surat keterangan, pendaftaran, pendaftaran surat kuasa hingga pengaduan.
- ❖ **Loket 3** → Kepaniteraan Pidana, melayani segala pelayanan publik yang menjadi tupoksi Kepaniteraan Pidana. Pelayanan publik tersebut antara lain: pendaftaran perkara pidana biasa, praperadilan, permohonan ijin besuk tahanan, dsb.
- ❖ **Loket 4** → Kepaniteraan Perdata, melayani segala pelayanan publik yang menjadi tupoksi Kepaniteraan Perdata. Pelayanan publik tersebut antara lain: pendaftaran perkara perdata permohonan, gugatan, dsb.
- ❖ **Pojok e-Court** untuk melayani segala pelayanan e-Court, mulai dari pendaftaran hingga persidangan secara online. Dengan tujuan untuk mempermudah pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara secara online.

Prioritas untuk melayani pengunjung yang menjadi prioritas pelayanan antara lain penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, orang tua dengan anak kecil, dan orang dengan kondisi kesehatan khusus, sehingga dapat terlayani lebih cepat.

Gambar 17 : Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Situbondo

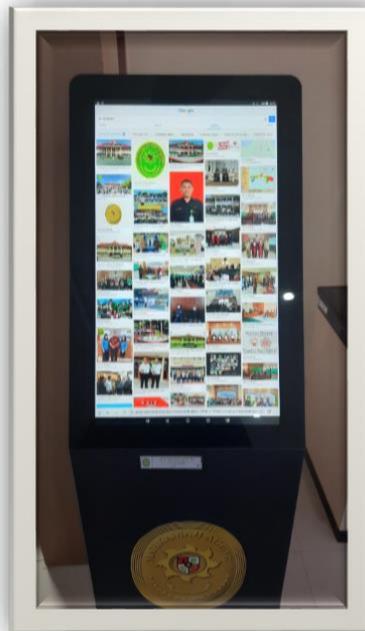




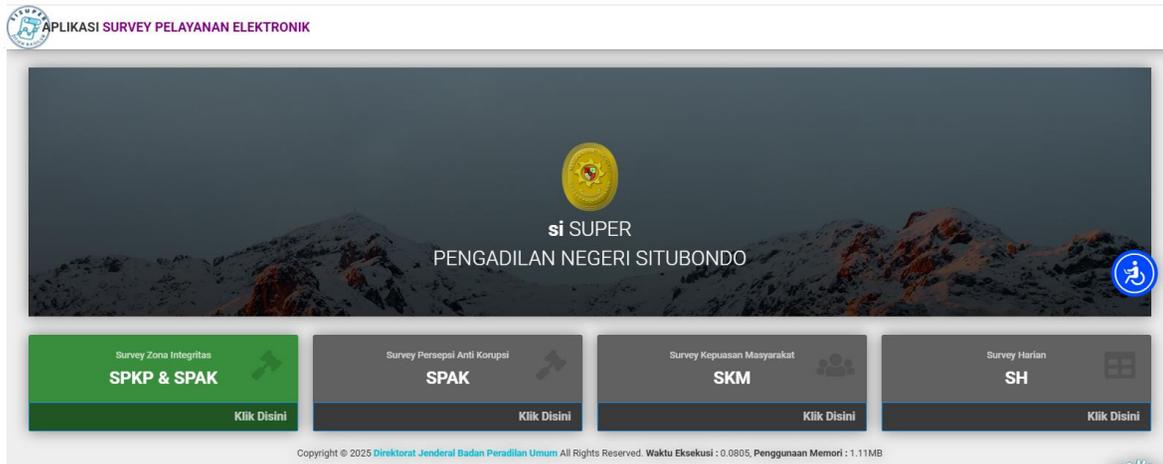
Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada para pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan, dilakukan *briefing* secara rutin kepada petugas PTSP.



Gambar 18 : Briefing Petugas PTSP di Pengadilan Negeri Situbondo



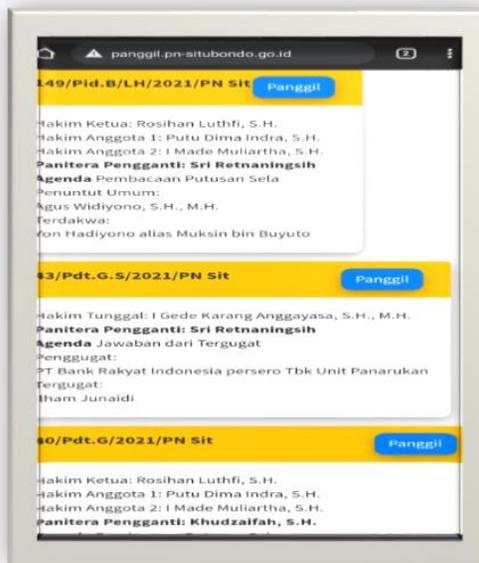
Gambar 19 Vestouch untuk informasi public



Gambar 20 Tampilan untuk Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi



Gambar 21 Monitor Jadwal Sidang



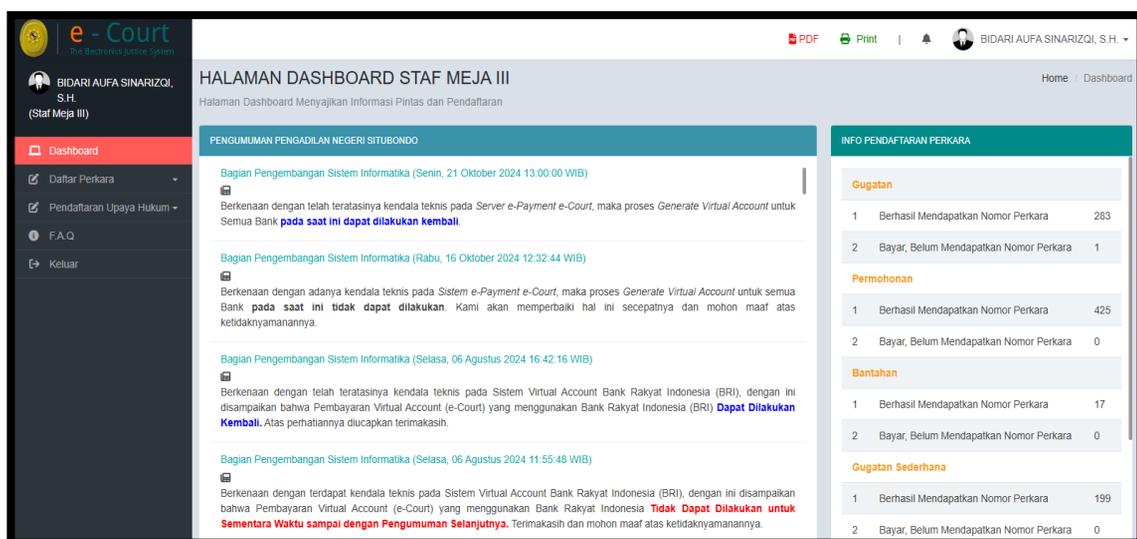
Gambar 22 Tampilan Aplikasi Antrian sidang Secara elektronik

C. Inovasi Pelayanan Publik

Guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang Pengadilan Negeri Situbondo memberikan layanan prima dengan berinovasi secara elektronik, bentuk kegiatan yang dimaksud menggunakan elektronik meliputi :

1. E-Court

E-Court adalah layanan bagi pengguna layanan pengadilan untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik., Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online.



Gambar 23 Aplikasi E- Court

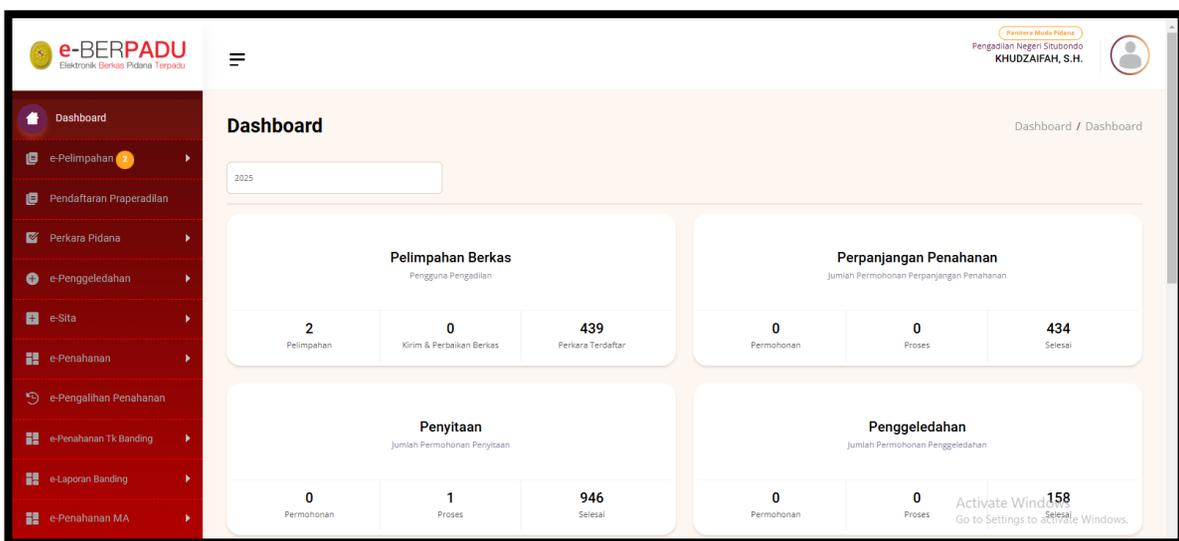
2. E-Berpadu

E-Berpadu adalah layanan bagi pengguna layanan pengadilan untuk pendaftaran perkara pidana secara online, hal lain yang terkait dengan proses perkara pidana antara lain

- E Pelimpahan Perkara Pidana dari Kejaksaan dan kepolisian (Pidana Biasa , Pidana Singkat , Pidana anak
- E Pendaftaran Pra Peradilan
- E Pengeledahan
- E Sita
- E Penahanan
- E Pengalihan Penahanan



- E Penahanan Tingkat Banding
- E Laporan Banding
- E Penahanan Mahkamah Agung
- E Penahanan Pembataran Penahanan
- E Penangguhan Penahanan
- E Diversi
- E Besuk tahanan
- E Ijin Kelua tahanan
- E Ijin Pinjam Pakai Barang Bukti
- E Pindah tempat sidang



Gambar 24 Aplikasi E- Berpandu

3. E-raterang/Surat Keterangan di Pengadilan Secara Elektronik

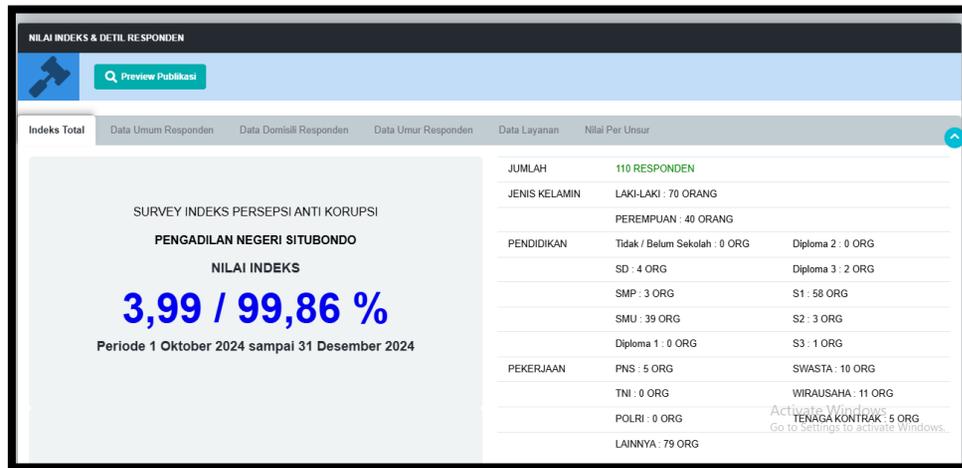
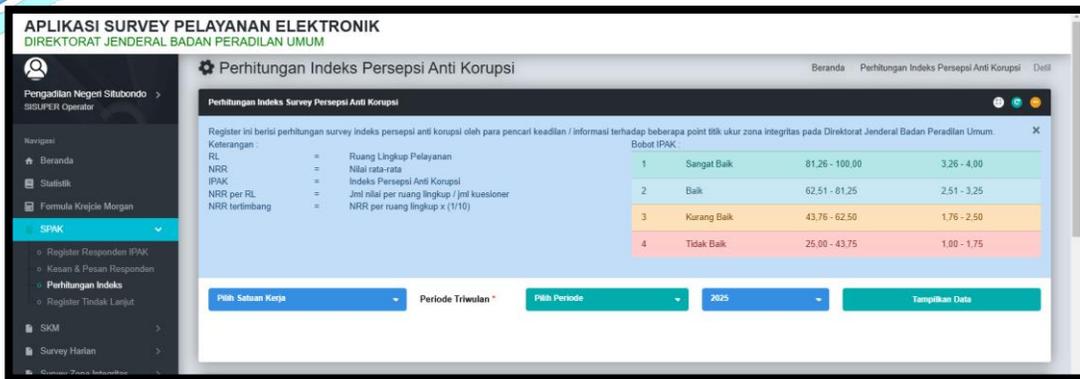
Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam pelayanan publik guna mempermudah akses keadilan dan berusaha perlu menerapkan aplikasi Surat Keterangan Elektronik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2016 tentang Semua Surat Keterangan, SEMA No. 2 Tahun 2018 tentang pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2016 , serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi PTSP+ dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) di lingkungan Peradilan Umum maka masyarakat yang akan mengajukan Surat Keterangan dimaksud dapat melakukan elektronik (eraterang). Aplikasi ini dapat diakses pada alamat: <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>.



Gambar 25 Aplikasi E- Eraterang

4. Survei Indeks Persepsi Korupsi

Pengadilan Negeri Situbondo berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.



Gambar 26 Indeks Persepsi Anti Korupsi Korupsi

5. Aplikasi Antrian PTSP

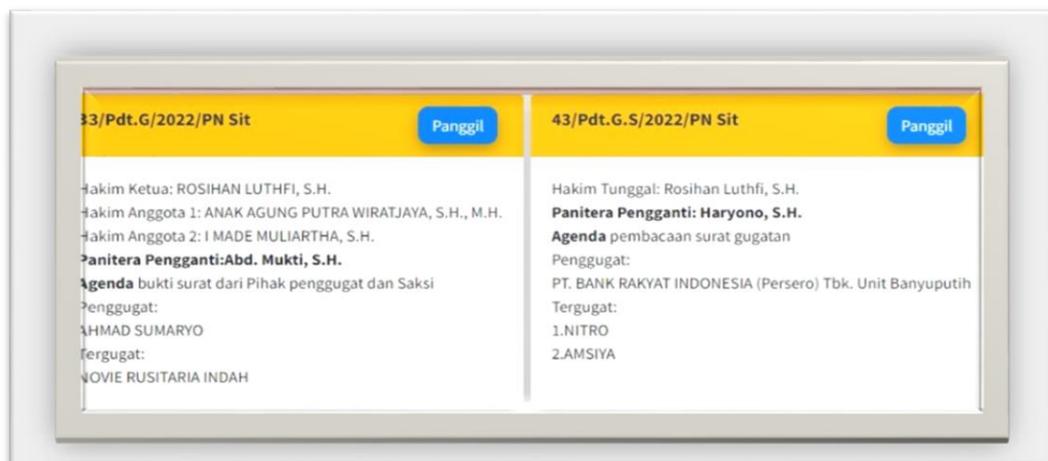
Antrian PTSP Pengadilan Negeri Situbondo adalah aplikasi antrian buat pengunjung para pencari keadilan yang berkepentingan terkait dengan bagian meja hukum,perdata,pidana dan umum. Dengan adanya aplikasi antrian PTSP ini bisa mempermudah para pencari keadilan untuk mengantri sesuai nomor antrian tersebut.



Gambar 27 Aplikasi Antrian PTSP

6. Aplikasi Antrian Panggilan Sidang

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan gilirannya untuk bersidang. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo.



Gambar 28 Antrian Panggilan Sidang

7. E- Brosur

E-Brosur berisikan tata cara pendaftaran perkara perdata secara elektronik melalui E-Court dan syarat apa saja yang diperlukan dalam pendaftaran E-Court, panduan pendaftaran permohonan surat keterangan melalui Eraterang, dan panduan pengajuan izin besuk melalui E-Berpadu.



Panduan Pembuatan Akun e-Court

1 KENALI JENIS PENGGUNA

PERORANGAN

Apabila maju sendiri sebagai pihak yang berperkara.

BADAN HUKUM

Apabila merupakan karyawan yang mewakili badan hukum (perseroan terbatas, CV, koperasi, atau yayasan) untuk berperkara.

2 MEMPERSIAPKAN DOKUMEN PERSYARATAN

Beberapa dokumen harus disiapkan untuk mengisi data-data pada formulir pembuatan akun e-Court yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo.

3 MENGIISI FORMULIR PEMBUATAN AKUN

Pengadilan Negeri Situbondo menyediakan formulir pengisian data calon pengguna akun e-Court dalam bentuk Google Form. Silakan klik tautan Google Form pembuatan akun e-Court berdasarkan jenis pengguna masing-masing: [CLICK HERE](#)

PERORANGAN **BADAN HUKUM**

PEREMINTAH

KUASA INSIDENTIL

Atau, dapat memindai QR Code berikut:

**Sebagai catatan, pembuatan akun e-Court ini hanya berlaku khusus bagi yang berdomisili/berperkara di Kabupaten Situbondo atau memiliki KTP Kabupaten Situbondo.*

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

Eraterang

Surat Keterangan Elektronik

Merupakan layanan permohonan surat keterangan secara online yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada selama ada akses internet dan smartphone/laptop/PC.

DASAR HUKUM

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan di Luar Perkara
- SK Dirjen Badilum Nomor 44/D.JII/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum

JENIS SURAT KETERANGAN

- Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
- Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
- Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
- Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik
- Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

DOKUMEN PERSYARATAN

- Permohonan Surat Keterangan (dicetak dari Eraterang);
- Fotocopy KTP (1 lembar)
- Fotocopy SKCK legalisir (1 lembar)
- Fotocopy Ijazah terakhir (1 lembar)
- Pasfoto 4x6 latar belakang merah (2 lembar)

SCAN BARCODE DI BAWAH INI UNTUK MASUK KE APLIKASI ERATERANG:

Tahapan Permohonan

01

PEMOMOHAN

Melakukan Pendaftaran Permohonan pada aplikasi Eraterang

Mitra Eraterang badilum, maknabumilangit@gmail

02

PEMOMOHAN

Melakukan Permohonan dengan mengisi Formulir Eraterang yang sudah disediakan

Mitra Eraterang badilum, maknabumilangit@gmail

03

PENGADILAN

Melakukan verifikasi data pemohon dan melakukan cek status

Surat dan perkara nasional pada aplikasi PTSP+

04

PENGADILAN

Cetak Surat Keterangan pada aplikasi PTSP+

05

PEMOMOHAN

Menerima Pengisian dengan membawa Surat Permohonan yang dicetak dan aplikasi Eraterang untuk mengisi Surat Keterangan

PROSEDUR PENGAJUAN IZIN BESUK TAHANAN MELALUI E-BERPADU

Syarat izin besuk tahanan:

1. Foto KTP Pemohon (Pastikan terbaca dengan jelas)
2. Nomor perkara terdakwa
3. Smartphone (Hp) atau komputer
4. Koneksi internet

4 Cek Ulang

Cek kembali semua data yang ada di kolom, pastikan semua terisi dengan benar

5 Simpan dan Cek Status

isi kode captcha yang sesuai, kemudian klik tombol "simpan", kemudian cek status melalui menu "cek pengajuan"

6

Pemohon akan menerima notifikasi permohonan izin besuk tahanan dan validasi izin besuk tahanan pada nomor whatsapp Pemohon

7

Pemohon dapat berkunjung ke Rumah Tahanan yang dituju dan menunjukkan dokumen elektronik pada handphone atau print out dokumen kepada petugas Rumah Tahanan

Selamat Datang

e-Berpadu Mahkamah Agung RI

SCAN ME!

@NegeriSitubondo @pn_situbondo itpnsitubondo@gmail.com Jl. Panglima Besar Sudirman No.97, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
<http://www.pn-situbondo.go.id> Pengadilan Negeri Situbondo (0338) 671397/ 08213290800

Gambar 29. E-Brosur

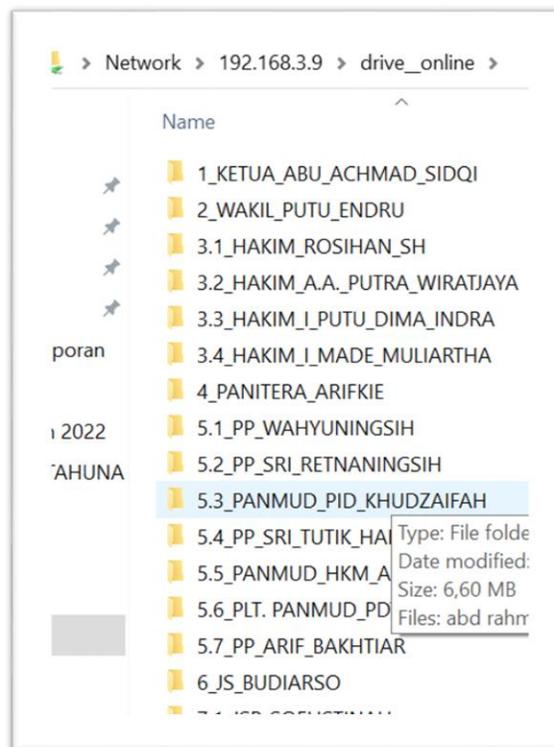


8. One Day Service

One Day Service merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dimana Perkara Permohonan Cukup 1 Hari Selesai terkait Salinan putusan ;

9. Arsip Digital

Arsip digital Pengadilan Negeri Situbondo merupakan media penyimpanan dan transfer data yang digunakan oleh pihak intern Pengadilan Negeri Situbondo. Arsip Digital bertujuan untuk membantu dan mempercepat distribusi data atau mentransfer file yang berkaitan dengan penanganan perkara di internal Pengadilan. Layanan ini sangat memudahkan pegawai untuk saling mengirimkan data tanpa harus melalui e-mail maupun flashdisk untuk dipindah. Dengan memasukkan alamat tertentu yang terhubung dengan jaringan internet, pengguna akan langsung diarahkan kepada ruang penyimpanan data pihak Pengadilan Negeri Situbondo, yang mana di dalamnya kita bisa membuat folder pribadi untuk mempermudah dalam merekap data.

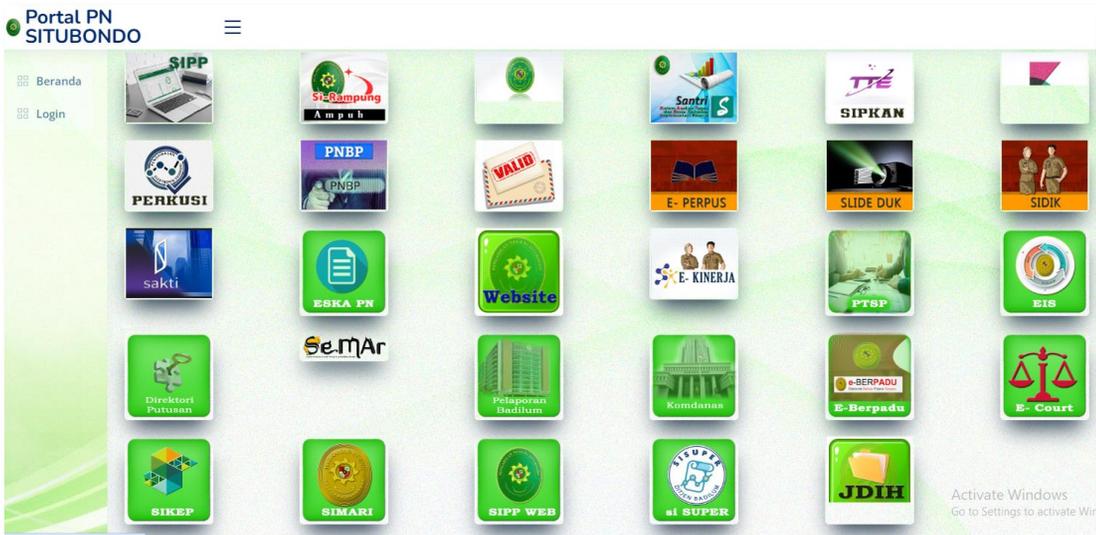


Gambar 30. Arsip Digital



10. Portal Data

Merupakan aplikasi yang memuat daftar Menu link aplikasi (Hyperlink) menuju aplikasi yang bisa digunakan di Kantor Pengadilan Negeri Situbondo, agar memudahkan para pegawai untuk melakukan akses pada aplikasi tersebut dalam satu tampilan layar utama.



Gambar 31. Tampilan Portal PN Situbondo

11. SANTRI

Adalah aplikasi yang untuk monitoring pada aplikasi Survey IKM dan IPK, dan Monitoring Ketertiban Pengisian SIPP dan dilengkapi dengan Broadcast Whatsapp jika terdapat item pada pengisian SIPP yang masih belum sesuai, Aplikasi Santri juga dapat monitoring penyerapan anggaran DIPA.

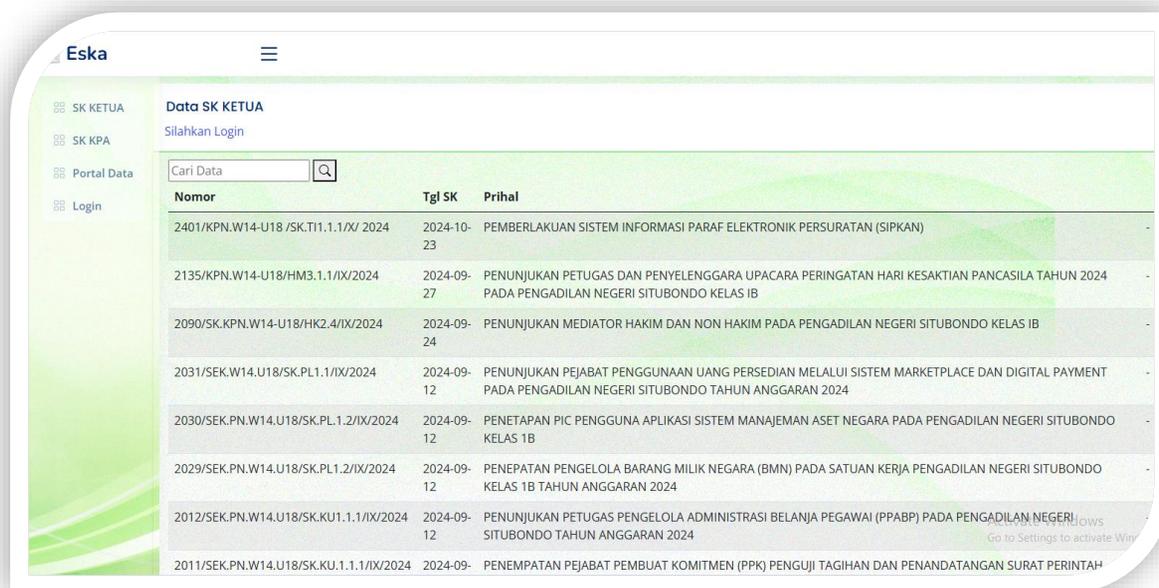


Gambar 32. Tampilan aplikasi Santri



12. ESKA

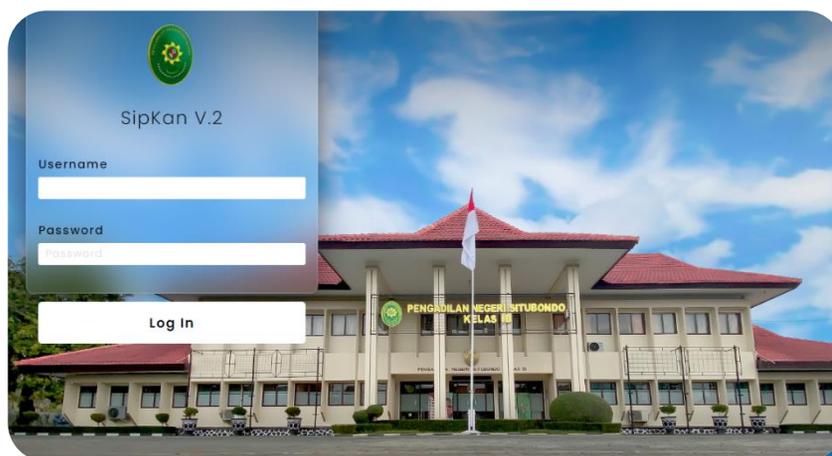
Aplikasi E-SKA adalah Elektronik Surat Keputusan yaitu untuk memuat semua Surat Keputusan dalam bentuk Elektronik dan berbasis database, sehingga dapat memudah melakukan pencarian data Surat Keputusan yang telah dokumentasi dan dapat di download atau diakses oleh orang atau pejabat yang berwenang.



Gambar 33. Tampilan aplikasi ESKA

13. SIPKAN

Aplikasi SIPKAN adalah Sistem Informasi Paraf Ketua Pengadilan, SIPKAN untuk mencatat surat atau dokumen untuk distribusi secara berjenjang, dari pembuatan, proses surat atau dokumen sampai telah diteliti dan benar serta di layak untuk proses selanjutnya dijadikan Dokument PDF yang ditandatangani secara TTE, dengan beralihnya bentuk document dari hardcopy menjadi digital sehingga perlu ada prosedur yang dapat mencatat distribusi surat tersebut dalam bentuk digital. Histori paraf tersebut disimpan dalam bentuk digital (database).





Reg	Surat	Tgl	Nomor	Proses	Sifat	Tujuan	Kepada
Sudah ACC							
Hukum	03-01-25 03-01	31/KPN.W.14.U.18	/OT.01.2/I/2025	-	Pengantar Laporan Tahunan Periode Tahun 2024		
Hukum	03-01-25 03-01	28/KPN.W.14.U.18	/OT.01.2/I/2025	-	Pengantar Laporan Gratifikasi Desember 2024		
Hukum	03-01-25 04-01	32/KPN.W.14.U.18	/HK.01.2/I/2025	-	Pengantar Laporan Akurasi Data SIPP Periode Juli-Desember 2024		
Hukum	03-01-25 03-01	29/KPN.W.14.U.18	/HK.01.2/I/2025	-	Pengantar Laporan Pengaduan Desember 2024		
Hukum	03-01-25 03-01	30/KPN.W.14.U.18	/OT.01.2/I/2025	-	Pengantar Laporan PPID Desember 2024		
Hukum	02-01-25 07-01	1/SK/HK/01/2025/PN	SIR	-	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana a.n ABD. AZIS		
Hukum	02-01-25 07-01	2/SK/HK/01/2025/PN	SIR	-	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya a.n ABD. AZIS		
Hukum	30-12-24 01-12	263/SK/HK/12/2024/PN	SIR	-	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana a.n YUDI HARDIYANTO		
Hukum	30-12-24 01-12	264/SK/HK/12/2024/PN	SIR	-	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya a.n YUDI HARDIYANTO		
Hukum	27-12-24 02-12	262/SK/HK/12/2024/PN	SIR	-	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya		
Hukum	27-12-24 02-12	261/SK/HK/12/2024/PN	SIR	-	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana		
Hukum	24-12-24 11-12	258/SK/HK/12/2024/PN	SIR	-	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana a.n FARID MARWANSAH		
Hukum	24-12-24 11-12	257/SK/HK/12/2024/PN	SIR	-	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana a.n FARID MARWANSAH		
Hukum	24-12-24 10-12	255/SK/HK/12/2024/PN	SIR	-	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana a.n MOH. HOIRI ALIF SUHDI		
Hukum	24-12-24 10-12	256/SK/HK/12/2024/PN	SIR	-	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya a.n MOH. HOIRI ALIF SUHDI		
Hukum	24-12-24 01-12	259/SK/HK/12/2024/PN	SIR	-	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana a.n DINY FAJRIYA		
Hukum	24-12-24 01-12	260/SK/HK/12/2024/PN	SIR	-	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya a.n DINY FAJRIYA		
Hukum	23-12-24 03-12	254/SK/HK/12/2024/PN	SIR	-	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya a.n SAHWARI		

Gambar 34 Tampilan Aplikasi SIPKAN

14. SILAPDIS

Pengadilan Negeri Situbondo telah membangun suatu aplikasi SILAPDIS (Sistem Informasi Laporan Pelaksanaan Disposisi Surat) sebagai monitoring bagi pimpinan atas pelaksanaan suatu disposisi surat. Diharapkan dengan aplikasi ini untuk meminimalisir terjadinya kelalaian atau kewajiban pelaksanaan sesuai disposisi dan efisien dalam proses pencarian data dan berkembang sebagai parameter dalam mengukur kinerja serta ketepatan dalam pelaksanaan intruksi pimpinan.

Reg	Nomor	Info Surat	Info
16533	10393/UN25.1.1/PP/2024 Tgl.2024-12-20	Pwermohonan tjin Magang	
16532	603/UN48.8.5/KM/2024 Tgl.2024-12-16	Permohonan Magang	

Gambar 35 Tampilan Aplikasi SILAPDIS

c. Kerjasama dengan Instansi/Lembaga/Organisasi Lain

Dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap berbagai lapisan masyarakat luas, khususnya Masyarakat Kabupaten Situbondo, Pengadilan Negeri Situbondo menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti Dinas Kominfo Situbondo, Pelopor peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) dan beberapa Lembaga Pendidikan.



The background of the page is an abstract design consisting of multiple overlapping, wavy bands of blue. The colors range from a very light, almost white blue to a deep, dark blue. The waves flow from the top right towards the bottom left, creating a sense of movement and depth. The overall effect is clean, modern, and professional.

BAB VI

PENGAWASAN



BAB VI

PENGAWASAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembaga peradilan wajib menjalankan pengawasan melekat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan (rutin/reguler) dalam upaya pengendalian internal.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pada pengadilan tingkat pertama, Wakil Ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para hakim pengawas bidang dan hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT). Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Situbondo telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang dengan Surat Keputusan Nomor 164/KPN.W14U18/OT1.2/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	HAKIM PENGAWAS BIDANG/ URUSAN
1.	Haries Suharman Lubis, S.H., M.H. NIP.197703272001121002	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2.	I Gede Karang A., S.H., M.H. NIP.197607132002121001	Hakim	1. Pidana 2. Hukum
3.	Rosihan Luthfi, S.H. NIP.197701132002121003	Hakim	1. Perencanaan, IT dan Pelaporan 2. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
4.	Anak Agung Putra W., S.H., M.H. NIP.198002042007041002	Hakim	1. Umum dan Keuangan 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	I Made Muliarta, S.H. NIP.198203142008051001	Hakim	1. Perdata 2. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.



Surat Keputusan Nomor 164.1/KPN.W14U18/ OT1.2/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB yang menunjuk Sdr. I Gede Karang A., S.H., M.H., NIP.19760713200212 1001, Hakim Madya Muda sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) pada Pengadilan Negeri Situbondo.





Hakim Pengawas Bidang bertugas untuk mengawasi jalannya administrasi pada Kepaniteraan dan Kesekretariatan agar berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi dan SOP yang sudah ditetapkan. Hakim pengawas bidang melaksanakan pengawasan setiap bulan dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada koordinator pengawas dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Situbondo. Kemudian membuat rekomendasi serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap temuan, sehingga tupoksi seluruh bagian berjalan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Situbondo.

Sesuai Buku I Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan, pembagian tugas Pengawasan Internal meliputi :

1. Ketua, melakukan pengawasan internal mengenai :
 - a. Ketepatan waktu memulai persidangan ;
 - b. Penyusunan cuort calender ;
 - c. Minutasi harus tepat waktu, terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan ;
 - d. Nilai sita jaminan harus seimbang dengan nilai gugatan;
 - e. Dalam menentukan nilai harga lelang agar diperhatikan juga harga umum dan pendapat termohon lelang ;
 - f. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang ;
 - g. Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat berita acara penutupan kas ;
 - h. Mengevaluasi laporan pereodik yang menyangkut kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirim laporan dan hasil evaluasi secara berkala kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
 - i. Mengevaluasi perbuatan dan kegiatan Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat kepaniteraan dan pejabat struktural dan pegawai yang dibuat secara berjenjang.
2. Wakil Ketua, melakukan pengawasan internal mengenai :
 - a. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan realitasnya ;



- b. Pengisian register perkara secara tertib dan terus menerus ;
 - c. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata dan Pidana kepada Panitera Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan ;
 - d. Pembuatan laporan pereodik oleh Panitera Muda Hukum ;
 - e. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - f. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus menerus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ICW dan peraturan pelaksanaannya) ;
 - g. Setiap pengeluaran biaya untuk kepentingan pemanggilan para pihak pemberitahuan putusan Hakim dan lain-lainnya, agar benar-benar sampai kepada yang berhak ;
 - h. Penyimpanan uang agar disimpan pada Bank Pemerintah dengan rekening yang terpisah antara keuangan perkara dan keuangan APBN ;
 - i. Penataan jam kerja yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tertib perkantoran
3. Hakim, melakukan pengawasan internal mengenai :
- a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana dan eksekusi yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan ;
 - b. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara pereodik mengunjungi Rutan / Lembaga Pemasayarakatan ;



B. EVALUASI



Gambar 38. Pengawasan dan Pembinaan



Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Situbondo telah berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab selaku atasan langsung.

Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang telah berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan - arahan, selanjutnya membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo yang disampaikan melalui Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawas setiap 1 bulan sekali dan apabila terdapat permasalahan akan dibahas dalam rapat berjenjang, dan apabila belum mendapatkan solusi maka akan dibahas pada forum rapat bulanan.

The background of the page is an abstract, flowing design of blue and white waves. The waves are composed of multiple overlapping, semi-transparent layers that create a sense of depth and movement. The colors range from light, airy blues to deeper, more saturated blues, with white highlights that give the waves a three-dimensional appearance. The overall effect is clean, modern, and professional.

BAB VII

PENUTUP



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada umumnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Situbondo telah berjalan dengan baik. Adapun uraian pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada Tingkat Pertama, masih ada sisa perkara tahun lalu sebanyak 70 perkara baik pidana maupun perdata, dan perkara yang masuk pada tahun 2024 kecuali perkara lalu lintas sebanyak 452 perkara, sehingga total perkara yang ada pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo ini sebanyak 552 perkara. Namun, perkara yang diputus pada tahun ini hanya sebanyak 445 perkara sehingga terdapat sisa perkara yang harus diselesaikan tahun berikutnya sebanyak 77 perkara.
2. Dari total 157 Perkara Perdata yang diputus Tahun 2024, 85,98% tidak mengajukan upaya hukum banding.
3. Dari total 226 Perkara Perdata yang diputus Tahun 2024, 88,49% tidak mengajukan upaya hukum banding.
4. Pada Tahun 2024 terdapat 48 pengajuan upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali.
5. Realisasi anggaran DIPA DIPA 01 sebesar 99.45 % dan DIPA 03 sebesar 99.62%.
6. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo mendapatkan anggaran posbakum sebesar Rp 28.000.000 dan telah direalisasikan 100%, sedangkan terkait sida keliling dan pembebasan biaya perkara (prodeo) belum ada karena tidak terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut.



7. Dengan adanya bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan baik oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun instansi terkait seperti Kementerian Keuangan, dapat meningkatkan kompetensi SDM pada Pengadilan Negeri Situbondo, sehingga diharapkan dapat menghasilkan inovasi yang dapat menunjang kinerja pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal. Kegiatan tersebut telah merata yang dilaksanakan oleh Pegawai di bidang teknis dan di bidang non teknis baik secara online maupun offline.

B. REKOMENDASI

Seluruh aparatur Pengadilan Negeri Situbondo agar selalu menambah ilmu dan meningkatkan skill baik pada bidang teknis maupun non teknis, serta masih perlu banyak ditingkatkan lagi terkait kompetensi dalam implementasi sistem informasi karena pada era ini segala sesuatunya telah menggunakan teknologi informasi.

Selain itu, seluruh aparatur Pengadilan Negeri Situbondo agar tetap menjaga integritas dan kinerja, kinerja anggaran dan membuat inovasi – inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat para pencari keadilan.

The background features a series of overlapping, wavy bands in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. The waves flow from the top right towards the bottom left, creating a sense of movement and depth. The overall aesthetic is clean, modern, and professional.

LAMPIRAN



KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR : 20/KPN.W14-U18/SK.OT1.6/I/ 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 9328/KPT. W14-U/OT1.6/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan *good governance* dan menciptakan budaya kerja yang efisien, transparan, dan akuntabel, maka setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB tentang Penunjukan Tim Pengelola dan Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024;
- c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim Pengelola dan Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan...

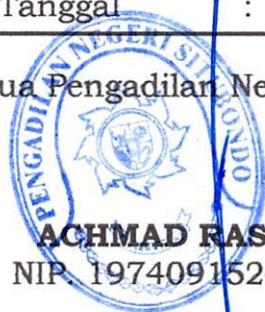
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pelaksanaan Kegiatan).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB;
- KESATU : Menunjuk nama-nama Pejabat/Pegawai pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB ini sebagai Tim Pengelola dan Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola dan Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 bertugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.
 2. Hasil pengumpulan data selanjutnya dikelola untuk penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 9328/KPT.W14-U/OT1.6/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

 Ketua Pengadilan Negeri Situbondo,


ACHMAD RASJID, S.H. 
NIP. 197409152000031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SITUBONDO KELAS IB
Nomor : 20/KPN.W14-U18 /SK.OT1.6 /I/ 2025
Tanggal : 3 Januari 2025

**TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penasehat
2.	I Ketut Sueca, S.H.	Panitera	Penanggung Jawab
3.	Iwan Mulyono, S.H.	Plh. Sekretaris/ Kasub bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Ketua Tim
4.	Intan Mustika A., S.H.	Kasub bag. Umum dan Keuangan	Koordinator
5.	Khudzaifah, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	Haryono, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	Abd. Mukti, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	Diah Wahyu Sulistiyo N., S.H.	Kasub bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota
9.	Shofil Setyarini, S.Sos.	Penata Layanan Operasional	Anggota
10.	Anis Rukmawati, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
11.	Anis Ismatun Nisa', S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
12.	Bidari Afa Sinarizqi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

✍ Ketua Pengadilan Negeri Situbondo,



ACHMAD RASJID, S.H. *AS*
NIP. 197409152000031001



PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Jl. Panglima Besar Sudirman No.97, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo,
Jawa Timur 68312, Email : itpsitubondo@gmail.com Website : www.pn-situbondo.go.id